

SKRIPSI

**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH DAERAH PADA
KABUPATEN MAROS**

SALAHUDIN

10573 0356412



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH DAERAH PADA
KABUPATEN MAROS**

SKRIPSI

Oleh

SALAHUDIN

NIM 10573 0356412



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

PERSEMBAHAN

1. Yang paling pertama dan paling utama ucapa terima kasih kepada Allah SWT dengan melafalkan syukur *Alhadulillah*
2. Bapak dan Ibu, yang telah memberikan kasih sayang serta doa dan mengajarkan arti kehidupan dan perjuangan yang sebenarnya.
3. Saudara-saudara dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan keinginan.
4. Untuk anggota Gudang yang telah memberikan moril maupun materi
5. Teman-teman yang selalu memberikan semangat sehingga Skripsi dapat terselesaikan sesuai harapan.
6. Almamaterku

MOTTO

"Jadilah orang yang berguna bagi orang lain".

"Semua yang ada di dunia ini tak ada yang abadi. Jadi manfaatkan kesempatan yang ada sebelum kamu menyesalinya".

"Hidup ini hanya sebentar, jangan gunakan hanya untuk memikirkan duniawi dan melakukan hal yang tak berguna".

"Life is a choice"



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salahudin

Stambuk : 105730356912

Jurusan : Akuntansi

Dengan Judul : "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis
Akrual Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Maros"

Dengan ini menyatakan bahwa:

***Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya
sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia
menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 8 Oktober 2018

Yang Membuat Pernyataan,



Salahudin
Salahudin

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi



Ismail Resuliong, SE, MM
NBM : 903 078

Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Badollahi
Ismail Badollahi, SE, M.Si, Ak, CA, CSP
NBM : 107 3428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis
AkruaPemerintah Daerah Pada Kabupaten Maros"

Nama Mahasiswa : Salahudin
No. Stambuk/NIM : 105730356912
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan I Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah di periksa dan diujikan di depan panitia
penguji skripsi Strata Satu (S1) pada 6 Oktober 2018 Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

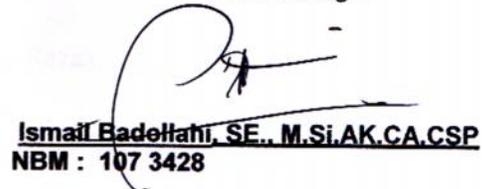
Makassar, 7 Oktober 2018

Menyetujui,

Pembimbing I


Drs. H. Hamzah Limpo, M. Si

Pembimbing II


Ismail Badollahi, SE., M.Si.AK.CA.CSP
NBM : 107 3428

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi


Ismail Basulung, SE., MM
NBM 903 078

Ketua Jurusan Akuntansi


Ismail Badollahi, SE., M.Si.Ak.CA.CSP
NBM : 107 3428



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JURUSAN AKUNTANSI

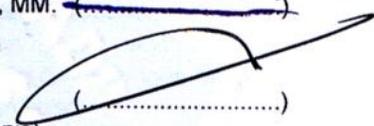
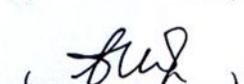
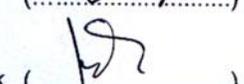
Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Telp. (0411)860 132 Makassar 90221

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **SALAHUDIN**, NIM: **10573 03569 12**, telah diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0009/2018, tanggal 26 Muharram 1440 H/06 Oktober 2018 M, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

26 Muharram 1440 H
Makassar, 06 Oktober 2018 M

Panitia Ujian

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM. (Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM. (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekertaris : Dr. Agus Salim HR., S.E., M.M. (WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji :
 1. Amir, S.E., M.Si. Ak. CA. 
 2. Linda Arisanty Razak, S.E., M.Si. Ak. 
 3. Faidhul Adziem, S.E., M.Si. 
 4. Muh. Nur Rasyid, S.E., M.M. 

Disahkan Oleh,
Rektor Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Ismail Rasulong, S.E., M.M.
NBM: 903078



ABSTRAK

Salahudin. Tahun 2018. *Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Maros.* Skripsi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH). Di bawah bimbingan H. Hamzah Limpo dan Ismail Badollahi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pemerintah daerah Kabupaten Maros dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Jenis penelitian yang digunakan dengan analisa deskriptif kualitatif. Data yang diolah berupa laporan keuangan Kabupaten Maros Tahun 2016. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan mendeskripsikan laporan keuangan. Hasil penelitian Pemerintah kabupaten Maros telah melaksanakan peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Pelaksanaan dari standar akuntansi pemerintah tersebut mewujudkan pemerintah Kabupaten Maros dalam rangka pelaksanaan tata pemerintahan yang baik meliputi transparansi, akuntabilitas dan partisipatif baik dari karyawan, Lembaga Legislatif, atau DPR maupun lembaga-lembaga soasial yang ada dikabupaten Maros melaksanakan sistem akuntansi yang telah dikemukakan. Penerapan sistem akuntansi pemerintah dilihat dari laporan keuangan menggambarkan cukup baik dalam penyusunannya sehingga mudah untuk dipahami kepada setiap pemakai laporan keuangan tersebut.

Kata Kunci : *Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Basis AkruaI*

ABSTRACT

Salahudin. 2018 Year. ***Accrual-Based Government Implementation Standards of Local Governments in Maros Regency***. Thesis, Accounting Department, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar (UNISMUH). Under the guidance of H. Hamzah Limpo and Ismail Badollahi.

This study was used to find out information about the local government. This type of research is used with qualitative descriptive analysis. The data processed in the form of Maros Regency 2016 financial statements. Data analysis techniques used are financial statements. The results of the research of the Maros District Government have translated Law No. 71 of 2010 regarding government accounting standards based on accruals. The implementation of the government accounting standards embodies the Maros regency government in the framework of implementing good governance including transparency, accountability and participatory both from employees, Legislative Institutions, or DPR or social institutions in Maros Regency implement the accounting system that has been proposed. Companies that are sourced from financial statements that are quite good in their preparation are very easy to understand for each user of the financial statements.

Keywords: Government Accounting Standards (SAP), Accrual Basis

KATA PENGANTAR



Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi penelitian dengan judul “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Maros”. Penyusunan skripsi penelitian ini dimaksudkan untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi penelitian ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, baik sumbangan pikiran, waktu, dan tenaga yang tercurah.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa isi maupun pengadaan skripsi penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, saran, kritik, dan bimbingan yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi sempurnanya skripsi penelitian ini. Terwujudnya skripsi penelitian bukan merupakan hasil kerja penulis semata, melainkan berkat dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE, MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak. CA selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Drs. H. Hamzah limpo, SE., M.Si dan Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak. CA selaku pembimbing dalam penulisan skripsi penelitian ini, yang dengan bijak dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga,serta pikirannya untuk membantu menyelesaikan skripsi penelitian ini.
5. Teristimewa Ayahanda Nurdin Ismail dan Ibunda Sa'adiyah yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang dan do'a yang tulus dan telah menitipkan kepercayaan untuk menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Unismuh Makassar. Untuk itu budi yang tulus dan terima kasihku tak pernah putus kupersembahkan kepada beliau.
6. Kepada seluruh sahabat-sahabatku yang selama ini sudah menemani hari-hariku di Fakultas Ekonomi terutama pada kelas Ak1 2012, semoga Allah SWT meridhoi segala aktivitas kita.
7. Tidak lupa juga kepada bapak/ibu yang dituakan angotota Gudang yang telah memberikan dukungan moral maupun materialnya.

Penulis menyadari sepenuhnya atas keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, sehingga dalam penyusunan skripsi penelitian ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Untuk itu, maka penulis dalam hal ini dengan senang hati menerima berbagai masukan, saran, dan kritik dari berbagai pihak yang bersifat membangun agar skripsi penelitian ini menjadi lebih baik dan dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Billahi fisabilil Haq fastabaqul khiarat, Wassalamualaium Wr.Wb

Makassar, Juni 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSEMBAHAN	ii
MOTTO	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Akuntansi Pemerintah Daerah.....	6
B. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Bernasis AkruaI	13
C. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan	19
D. Komponene Laporan Keuangan Berbasiss AkruaI.....	22

E. Persiapan Penerapan Satandar Akuntansi Pemerintah berbasis AkruaI	33
F. Kerangka Pikir	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis dan Sumber Data	39
B. Tempat dan Waktu Penelitian	39
C. Metode Penelitian	40
D. Metode Pengumpulan Data	40
E. Metode Analisis Data.....	40
BAB IV GAMBARAN UMUM KABUPATEN MAROS	42
A. Sejarah Umum Kabupaten Maros	42
B. Batas Wilayah	45
C. Visi dan Misi.....	46
D. Struktur Organisasi	48
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Maros	51
B. Sistem Akuntansi Berbasis AkruaI di Kabupaten Maros	56
C. Bentuk Dan Susunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Maros.....	59
D. Akuntansi Berbasis AkruaI Dipemerintah Kabupaten Maros.....	78
BAB VI PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA.....	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
Gambar 2.1	Pentahapan Implementasi SAP akrual Pemerintah Daerah	36
Gambar 2.2	Kerangka Fikir	38
Gambar 4.1	Bagan Struktur Organisasi Kabupaten Maros	48
Gambar 5.1	Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Basis Akrual	57

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
Tabel 5.1:Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2016.....	60
Tabal 5.2: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2016.....	64
Tabel 5.3: Laporan Operasional (LO) Pemerintah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2016.....	65
Tabel 5.4:Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Pemerintah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2016.....	67
Tabel 5.5:Neraca Pemerintah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2016.....	69
Tabel 5.6:Tabel Laporan Arus Kas (LAK) Pemerintah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2016.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi keuangan negara telah dimulai sejak tahun 2003 ditandai dengan lahirnya paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, dan undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ketiga paket undang-undang ini mendasari pengelolaan keuangan negara yang mengacu pada *international best practices*. Setelah undang-undang tersebut, selanjutnya bermunculan beberapa peraturan pemerintah yang pada intinya bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama yang berkaitan dengan masalah keuangan. Reformasi pengelolaan keuangan negara/daerah tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan yang mendasar pada pengelolaan keuangan negara/daerah. Peraturan baru tersebut menjadi dasar bagi institusi negara mengubah pola administrasi keuangan (*financial administration*) menjadi pengelolaan keuangan negara (*financial management*).

Dalam rangka menciptakan tata kelola yang baik (*good governance*), pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang

bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Pemerintah selanjutnya mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu komite standar independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan presiden tentang komite standar akuntansi pemerintahan (Mardiasmo : 17). Ketentuan dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 pasal 36 ayat (1) tentang keuangan negara, mengamanatkan penggunaan basis akrual dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja, yang berbunyi sebagai berikut: “Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13,14,15 dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas”.

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, KSAP telah menyusun standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang ditetapkan dengan PP nomor 71 tahun 2010 menggantikan PP nomor 24 tahun 2005. Dengan ditetapkannya PP nomor 71 tahun 2010 maka penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Dan hal ini berarti juga bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual.

Berlakunya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual

penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Perubahan basis tersebut selain telah diamanatkan oleh paket undang-undang keuangan negara, juga diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja. Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memerhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Dalam akuntansi berbasis akrual waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Pengaruh perlakuan akrual dalam akuntansi berbasis kas menuju akrual sudah banyak diakomodasi di dalam laporan keuangan terutama neraca yang disusun sesuai dengan PP nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Keberadaan pos piutang, aset tetap, dan hutang merupakan bukti adanya proses pembukuan yang dipengaruhi oleh asas akrual. Ketika akrual hendak dilakukan sepenuhnya untuk menggambarkan berlangsungnya esensi transaksi atau kejadian, maka kelebihan yang diperoleh dari penerapan akrual adalah tergambarkannya informasi operasi atau kegiatan. Dalam akuntansi pemerintahan, gambaran perkembangan operasi atau kegiatan ini dituangkan dalam bentuk laporan operasional atau laporan surplus/defisit. Perubahan perlakuan akuntansi pemerintah menuju basis akrual akan membawa dampak/implikasi walau sekecil apapun. Perubahan menuju arah yang lebih baik ini bukan berarti hadir tanpa masalah. Pertanyaan pro-kontra mengenai siap dan

tidak siapkah pemerintah daerah mengimplementasikan SAP berbasis akrual ini akan terus timbul.

Pemerintah daerah Babupaten Maros wajib menyusun laporan keuangan berlandaskan pada standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang berlaku. Kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan menjadi dasar diberikannya opini atas laporan keuangan pemerintah daerah Babupaten Maros. Pemerintah daerah Babupaten Maros sendiri, sampai dengan saat ini masih menerapkan basis kas menuju akrual. Terkait dengan penerapan basis akrual sendiri, pemerintah daerah Babupaten Maros harus melakukan berbagai persiapan, seperti penyusunan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual, pelatihan sumber daya manusia, dan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang penerapan basis akrual. Persiapan tersebut dilakukan pemerintah daerah Babupaten Maros agar siap dan dapat mengatasi berbagai kendala dalam penerapan basis akrual.

Berdasarkan fakta di atas, peneliti tertarik menganalisis bagaimana realisasi pelaksanaan pemerintah daerah Kabupaten Maros dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangannya.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan pemerintah daerah Kabupaten Maros dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagaimana dianjurkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan diadakan adalah untuk mengetahui realisasi pelaksanaan pemerintah daerah Kabupaten Maros dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

Manfaat praktis penelitian yang akan diadakan adalah memberikan masukan atau bahan pertimbangan dalam penerapan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 agar dapat menerapkan akuntansi pemerintahan berbasis akrual secara maksimal. Penelitian ini juga diharapkan dapat meminimalkan kesalahan dalam penyusunan pelaporan keuangan dengan adanya identifikasi kemungkinan kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam menerapkan basis akrual. Secara umum juga diharapkan kualitas dan kuantitas pelaporan keuangan dalam pemerintahan akan meningkat.

2. Manfaat teoritis

Hasil penelitian yang akan diadakan diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan standar akuntansi pemerintahan, khususnya mengenai basis akrual. Selain itu, manfaat penelitian ini adalah bagi peneliti dan orang-orang yang berminat mengkaji standar akuntansi pemerintahan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

3. Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah daerah kabupaten Maros tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah sesuai dengan PP 71 tahun 2010.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Akuntansi Pemerintah Daerah

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3) Pemerintah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

1. Perkembangan Akuntansi Pada Pemerintah Daerah

1.1 Perkembangan Tahap Awal

Penerapan akuntansi pemerintah sebelum dilakukan reformasi pengelolaan keuangan Negara, telah menerapkan sistem pencatatan *single entry*. Pada sistem pencatatan ini menurut (Abdul Halim, 2004) pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali, transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi ekonomi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran.

Hasil dari sistem pencatatan ini, pemerintah tidak memiliki pencatatan tentang piutang dan utang, apalagi pencatatan dengan asset tetap yang dimiliki dan equitas. Sehingga selama itu pemerintah tidak pernah menampilkan neraca

sebagai salah satu bentuk laporan keuangan yang umum kita kenal guna menggambarkan posisi keuangan pemerintah. Hal ini disebabkan juga karena basis akuntansi yang digunakan selama ini adalah basis kas, pada basis ini menurut (Indra Bastian, 2006) hanya mengakui arus kas masuk dan arus kas keluar. Rekening keuangan akhir akan dirangkum dalam buku kas, sehingga laporan keuangan tidak bisa dihasilkan karena ketiadaan dan tentang asset dan kewajiban.

Setelah pemerintah melakukan reformasi pengelolaan keuangan Negara baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, terutama dengan ditetapkannya undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Pada undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut khususnya pada pasal 30, 31 dan pasal 32 disebutkan bahwa Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang dimaksud setidaknya meliputi laporan realisasi Keuangan. Laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Tidak berhenti hanya sampai disitu, selanjutnya ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, pada Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa akuntansi keuangan diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Pada pasal 57 disebutkan bahwa untuk menyusun standar akuntansi pemerintah yang berlaku baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pemerintah membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP).

Sesudah Undang-Undang Nomor 1 2004 tersebut ditetapkan, selanjutnya ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah, pada pasal 184 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan SAP yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, dan dilanjutkan dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Dan Pemerintah Daerah pada pasal 81 mengatur laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. Sedangkan untuk pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara juga telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

Guna membentuk KSAP telah dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintah, dan telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005, KSAP bertugas menyusun konsep rancangan peraturan pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam melakukan kerjanya, KSAP melalui tatap-tahap penyiapan SAP sebagai berikut :

- a. Identifikasi Topik Untuk Dipertimbangkan Menjadi Standar
- b. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) didalam KSAP
- c. Riset Terbatas oleh Kelompok Kerja
- d. Penulisan Draf SAP oleh Kelompok Kerja
- e. Pembahasan oleh Komite Kerja
- f. Pengambilan Keputusan Draf untuk Dipublikasikan
- g. Peluncuran Draf Publikasi SAP (*Exposure draf*)
- h. Dengar Pendapat Terbatas (*Limited Hearing*) dan Dengar Pendapat Publik
- i. Pembahasan Tanggapan dan Masukan Terhadap Draf Publikasian

j. Finalisasi Standar

Setelah melewati tahapan-tahapan tersebut diatas pada tanggal 13 juni 2005 Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pmemerintah. Pada SAP tersebut menyatakan bahwa laporan keuangan pokok terdiri dari : a) Laporan Realisasi Anggaran, b) Neraca, c) Laporan Arus Kas, d) CatatanAtas Laporan Keuangan.

Setelah ditetapkan SAP ini maka pemerintah harus menyusun laporan keuangan yang lengkap sesuai bentuk tanggungjawab pengelolaan keuangan pemerintah dibandingkan dengan sebelum ditetapkan SAP ini. Oleh karena itu, sistem pencatatan *single entry* yang selama ini digunakan, tidak mungkin lagi bisa diterapkan karena tidak dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih lengkap, mau tak mau pemerintah harus beralih kepada system pencatatan *double entry*, pada system ini menurut (Abdul Halim, 2004) pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali dalam sisi debet dan sisi kredit. Tidak hanya itu saja, pada SAP basis ini pencatatan yang digunakan adalah basis transisi yaitu basis kas menuju akrual yang diistilahkan basis *cash towards accrual*.

Pada tingkatan pemerintah daerah reformasi pengelolaan keuangan ini terus berlanjut dengan ditetapkannya peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang didalamnya juga termasuk untuk pemerintah daerah.

Semenjak disusunnya laporan keuangan secara lengkap oleh pemerintah daerah yaitu mulai tahun 2006 lalu, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), berdasarkan laporan audit BPK-RI tersebut, masih sangat sedikit pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berikut ini adalah perkembangan opini LKPD dari tahun 2006-2008 :

LKPD	WTP	WDP	TW	TMP
2006	4	326	28	106
2007	3	283	58	122
2008	8	217	21	47

Sumber: LHPS 1 Tahun 2009, (BPK, 2009) per 31 2009

WDP = Wajar Dengan Pengecualian

TW = Tidak Wajar

TMP = Tidak Memberikan Pendapat

Salah satu permasalahan mendasar penyebab terjadinya LKPD yang tidak mendapat opini WTP dari BPK-RI, dan nyata dihadapi banyak instansi pemerintah, baik dipusat maupun didaerah, adalah kelangkaan sumber daya manusia aparatur (kelangkaan sarjana akuntansi) yang memiliki kompetensi yang memadai untuk menyelenggarakan administrasi keuangan Negara/daerah.

Dalam mengatasi hal ini, khususnya bagi pemerintah daerah hendaknya mulai mengubah kebijakan rekrumen pegawai baru, yaitu lebih mengutamakan/memperbanyak jumlah penerimaan pegawai baru dan sarjana akuntansi yang memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang akuntansi

pemerintah, disamping itu, diharapkan kepada Universitas atau Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi untuk memulai mengembangkan konsentrasi akuntansi pemerintah pada jurusan akuntansi yang dimiliki.

1.2 Perkembangan Tahap Kedua

Setelah lebih kurang lima belas tahun berlalu, pemerintah melalui KSAP pada tanggal 22 Oktober 2010 mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua. Dengan dikelurkannya peraturan pemerintah tersebut, dimulailah perkembangan tahap kedua penerapan akuntansi pemerintah.

Pada SAP berbasis akrual ini, beberapa isu penting perubahan yang perlu dipahami adalah:

1. Laporan keuangan pokok yang disusun pada SAP lama (PP No 24/2005) terdiri dari:
 - a) Laporan Realisasi Anggaran,
 - b) Neraca,
 - c) Laporan Arus Kas, dan
 - d) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Sedangkan pada SAP baru (PP No 71/2010) komponen laporan keuangan terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL),
- c. Neraca,
- d. Laporan Operasional,
- e. Laporan Arus Kas (LAK),

- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. Hubungan antar laporan keuangan atas laporan

a. Laporan Finansial



b. Laporan Pelaksanaan Anggaran



- 3. Basis Pencatatan yang digunakan pada SAP lama yaitu basis kas menuju akrual, sedangkan SAP baru, basis yang digunakan yaitu basis akrual.
- 4. Dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, pemerintah tetap menggunakan basis kas, sedangkan penyusunan Neraca dan Laporan Operasional menggunakan basis akrual.

Dampak dari perkembangan dan perubahan-perubahan yang terjadi tentu memerlukan kesiapan sumber daya manusia pada pemerintah daerah, yang didukung dengan adanya keinginan dari kepala daerah untuk mengelola keuangan secara transparan akuntabel. Buku ini mencoba memberikan pemahaman dasar tentang teknik akuntansi pemerintahan daerah khususnya daerah kabupaten dan kota, bagi mahasiswa akuntansi yang mendalami akuntansi pemerintahan dan praktisi akuntansi pemerintahan daerah.

B. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis AkruaI

Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI tersebut terdiri dari Kerangka Konseptual dan 12 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP), yaitu:

- PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan
- PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
- PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas
- PSAP 04 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan
- PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan
- PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi
- PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap
- PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
- PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban
- PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasional yang Dilanjutkan
- PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi
- PSAP 12 tentang Laporan Operasional

Kerangka Konseptual merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintah. Kerangka Akuntansi yang belum dinyatakan dalam Standar Akuntansi Pemerintah, akan tetapi bila terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dengan standar, maka ketentuan standar diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual. Kerangka konseptual membahas hal-hal antara lain sebagai berikut:

1. Tujuan Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintah bertujuan untuk memberikan acuan bagi:

- a. Penyusunan standar akuntansi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya,
- b. Penyusunan laporan keuangan dalam menaggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar,
- c. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah; dan
- d. Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang diajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

2. Lingkungan Akuntansi Pemerintah

Lingkungan Operasional organisasi pemerintah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintah yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:

- (1) Ciri utama struktur pemerintah dan pelayanan yang diberikan
 - a. Bentuk umum pemerintah dan pemisahan kekuasaan;
 - b. Sistem pemerintah otonomi dan transfer penda[atan antar pemerintah;
 - c. Pengaruh politik;
 - d. Hubungan antar pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah;
- (2) Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian
 - a. Anggaran sebagai pernyataan sebagai kebijakan public, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian;

- b. Investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan; dan
- c. Penyusutan nilai aset sebagai sumberdaya ekonomi karena digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah.

3. Pengguna dan Kebutuhan Informasi Para Pengguna

3.1 Pengguna Laporan Keuangan

Terdapat beberapa-beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada:

- a. Masyarakat;
- b. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa;
- c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
- d. Pemerintah.

3.2 Kebutuhan Informasi para pengguna laporan keuangan

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi tujuan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian, laporan keuangan berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan, maka laporan keuangan yang disajikan mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory report*). Disamping itu, kebutuhan informasi para pembayar pajak perlu mendapat perhatian.

Kebutuhan informasi tentang operasional pemerintah dapat dipenuhi dengan baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual, bukan pada basis arus kas semata. Namun, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengharuskan penyajian suatu laporan keuangan dengan basis kas, maka laporan keuangan yang dimaksud wajib dilaporkan demikian.

4. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan

4.1 Peranan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan dan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah yang berkepentingan masyarakat.

c. **Transparansi**

Memerikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. **Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*)**

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan dalam penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan mananggung beban pengeluaran tersebut.

e. **Evaluasi Kinerja**

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

4.2 Tujuan Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan yang baik keputusan ekonomi, sosila, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;

- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

5. Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan Pokok terdiri dari:

- h. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- i. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
- j. Neraca
- k. Laporan Operasional
- l. Laporan Arus Kas (LAK)
- m. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- n. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

C. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

a. Relevan

Laporan keuangan yang bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan:

1. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu.

2. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

3. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

4. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan secara lengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang dimuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi, informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka, pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

5. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya yang disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

6. Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, apabila pengujian dilakukan lebih dari satu kali oleh pihak yang berbeda jauh.

c. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal

dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pemahaman yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

D. Komponen Laporan Keuangan Berbasis Akrua

Dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrua (PSAP BA) dalam paragraf 14 dijelaskan bahwa komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

1. Laporan Reslisasi Anggaran

Walapun peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua telah menetapkan basis pencatatan yang digunakan adalah akrua, namun dalam penyusunan laporan Realisasi anggaran tetap disajikan dengan menggunakan basis kas (PSAP BA 02 paragraf 03 dan 04).

Struktur laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi a) pendapatan-LRA, b) belanja, c) transfer, d) surplus/defisit-LRA, e) pembiayaan dan f) sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

Masing-masing dari struktur realisasi anggaran tersebut didefinisikan dalam PSAP BA 02 paragraf 07 sebagai berikut:

a. Pendapatan-LRA

Merupakan semua penerimaan rekening kas umum Negara/daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

b. Belanja

Merupakan semua pengeluaran dari rekening kas Negara/daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

c. Transfer

Merupakan penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lainnya, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

d. Surplus/Defisit-LRA

Merupakan selisih lebih/kurang antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode.

e. Pembiayaan

Merupakan penerimaan yang erlu dibayar kembali dan/pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

f. SiLPA/SiKPA

Merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Dalam PSAP BA 01 paragraf 14 dijelaskan bahwa lapran perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos beriku:

- a. saldo anggaran lebih awal;
- b. penggunaan saldo anggaran lebih;

- c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan;
- d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- e. lain-lain;
- f. saldo anggaran akhir.

3. Neraca

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan entitas laporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

3.1 Aset

PSAP BA 01 paragraf 8, mendefinisikan aset sebagai sumber data ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk non penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

3.1.1 Aset Lancar

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar. Dalam PSAP BA 01 paragraf 54 dinyatakan bahwa suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Semua aset yang tidak termasuk dalam pengertian diatas diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

3.1.2 Aset Nonlancar

Sementara itu, dalam PSAP BA 01 paragraf 56 dijelaskan bahwa aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat.

Selanjutnya, dalam paragraph 57 menyatakan bahwa aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

a. Investasi Jangka Panjang

investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi yang permanen dan investasi nonpermanen. Yang dimaksud investaasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, yang terdiri dari penyertaan modal pemerintah pada perusahaan Negara/daerah, lembaga keuangan Negara, badan hokum milik Negara, badan internasional dan badan hokum lainnya bukan milik negar, serta investasi permanen lainnya (PSAP BA 01).

Sedangkan investasi nonpermanen merupakan informasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara tidak berkelanjutan, yang terdiri dari investas dalam surat utang Negara, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, dan investasi nonpermanen lainnya (PSAP BA 01).

b. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset beerwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan

oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari: tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, jalan, dan irigasi, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan (PSAP BA 01 paragraf 63 dan 64).

c. Dana Cadangan

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan tersebut harus dirinci menurut tujuan pembentukannya (PSAP BA 01 paragraf 65).

d. Aset lainnya

Aset nonlancar lainnya selesai investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan diklasifikasikan sebagai aset lainnya, yang termasuk sebagai aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya (PSAP BA 01 paragraf 66).

3.2 Kewajiban

Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, penjelasan kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan (PSAP BA 01 paragraf 75). Beberapa yang termasuk dalam kewajiban jangka pendek adalah utang transfer pemerintah, utang kepada pegawai, bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Jika kewajiban diharapkan dibayar lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang adalah: utang dalam negeri, utang obligasi utang jangka panjang lainnya,

3.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah pada laporan perubahan ekuitas (PSAP BA 01 paragraf 84 dan 85).

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan salah satu laporan yang harus disusun oleh pemerintah daerah setelah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua.

Manfaat disusunnya laporan operasional ini, yaitu tersedia informasi mengenai seluruh kegiatan perasional keuangan entitas pelaporan, dan penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

PSAP BA 12 paragraf 13 menjelaskan bahwa struktur laporan oprasional mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO
- b. Beban
- c. Surplus/Defisit dari operasional
- d. Kegiatan non perasional
- e. Surplus/Defisit sebelum pos keluar
- f. Pos luar biasa
- g. Surplus/Defisit-LO

Sebelum digambarkan format laporan operasional, sebelumnya akan dijelaskan terlebih dahulu definisi atau pengertian dari masing-masing pos dalam laporan operasional tersebut, yaitu:

a. Pendapatan-LO

Merupakan hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali (PSAP BA 12 paragraf 8).

b. Beban

Merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban (PSAP BA 12 paragraf 8).

c. Surplus/Defisit dari kegiatan operasional

Merupakan selisih lebih/kurang antara pendapatan operasional dan beban selama satu periode pelaporan (PSAP BA 12 paragraf 8).

d. Kegiatan non operasional

merupakan pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional (PSAP BA 12 paragraf 45).

e. Surplus/Defisit sebelum pos keluar

Merupakan penjumlahan atau pengurangan surplus/defisit dari kegiatan operasional dengan kegiatan non operasional.

f. Pos Luar Biasa

Merupakan pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak

diharapkan sering atau rutun terjadi, dan berad diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan (PSAP BA 12 paragraf 8).

g. Surplus/Defisit-LO

merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa (PSAP BA 12 paragraf 8).

5. Laporan Arus Kas

Laporan Keuangan berikutnya yang harus disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua adalah laporan arus kas. Lebih lanjut, laporan arus kas ini diatur dalam PSAP BA 03.

PSAP BA 03 paragraf 15 mendefinisikan laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasional, investasi, pendanaan, dan trasitoris.

Berikut ini akan dijelaskan lebih lanjut dari pengertian-pengertian dari aktivitas dimaksud dalam definisi diatas, yaitu:

a. Aktivitas Operasi

Aktivitas Operasi adalah aktivitas pnenerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi (PSAP BA 03 paragraf 8).

b. Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditijukan untuk perolehan dan pelepasan asset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas (PSAP BA 03 paragraf 8).

c. Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dan jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang (PSAP BA 03 paragraf 8).

d. Aktivitas Transitoris

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam operasi, investasi, dan pendanaan (PSAP BA 03 paragraf 8).

Selanjutnya, dalam PSAP BA 03 paragraf 13 menyatakan bahwa entitas peleporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Berdasarkan pernyataan pada paragraph 13 tersebut, maka pada pemerintah daerah yang wajib menyusun laporan arus kas adalah Badan Pengeluaran Keuangan Daerah (BPKD), yang pada pemerintah daerah disebut sebagai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD).

Adapun metode yang digunakan pemerintah daerah dalam menyusun laporan arus kas ini adalah metode langsung dan metode tak langsung. Metode langsung dilakukan dengan mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto. Sedangkan metode tidak langsung dilakukan dengan cara surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional nonkas, penangguha (*deferral*) atau pengakuan (*accrual*) penerimaan kas atau pembayaran yang lalu/ yang akan datang, serta unsure penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk kasyag berkaitan dengan aktivitas investasi dan pendanaan (PSAP BA 03 paragraf 40).

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan yang harus disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrual.

PSAP BA 01 paragraf 101 menjelaskan lebih lanjut bahwa laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a. Ekuitas awal.
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan.
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode=periode sebelumnya;
 - 2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap
- d. Ekuitas Akhir

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

PSAP BA 01 paragraf 83 menjelaskan bahwa catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan negatif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Selain itu catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan/menyajikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

- b. Menyediakan informasi umum tentang kebijakan fiskal/keuangan dan entitas makro.
- c. Menyediakan informasi ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh PSAP yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajib, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

E. Persiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Secara yuridis, keluarnya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual mengubah haluan basis akuntansi pemerintahan Indonesia dari kas menuju akrual menjadi akrual penuh. Sesuai kesepakatan pemerintah dan DPR, implementasi basis akrual ini akan dilaksanakan secara bertahap hingga implementasi penuhnya di tahun 2015.

Untuk mengimplementasikan secara penuh pada tahun 2015 nanti, tentu pemerintah kita memerlukan strategi. Prasyarat pelaksanaan strategi terbagi atas dua kondisi dasar, yaitu *necessary condition* dan *sufficient condition*. *Necessary condition* adalah prasyarat yang dibutuhkan agar suatu kondisi dapat tercapai. Setelahnya, pemerintah dapat mengembangkan beberapa hal sehingga kondisinya bisa berubah menjadi kondisi yang mencukupi (*sufficient condition*).

Necessary condition adalah komitmen, kapasitas SDM, dan dana pemeliharaan (www.medinamultimitra.com). Untuk dapat mengimplementasikan basis akrual yang notabene adalah barang baru, dibutuhkan komitmen dari para pemimpin dan pejabat, termasuk dukungan politik dari kepala daerah dan DPRD. Di samping itu, SDM yang menguasai ilmu dan konsep akuntansi dalam jumlah yang memadai juga sangat dibutuhkan mengingat mereka adalah ujung tombak dari implementasi ini. Implementasi basis akrual juga membutuhkan pendanaan yang cukup. Tidak hanya untuk investasi awal, tetapi juga untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat pemeliharaan. Hal ini disebabkan penerapan basis akrual membutuhkan pembaharuan yang terus menerus, sehingga tersedianya dana pemeliharaan pun menjadi mutlak.

Persyaratan tambahan untuk mengubah kondisi menjadi *sufficientcondition* tersebut adalah kebijakan akuntansi, prosedur dan teknologi. Pengembangan dokumen kebijakan akuntansi berbasis akrual dibutuhkan untuk mengakomodasi SAP. Idealnya, dokumen ini didesain sedemikian rupa sesuai dengan kondisi khas di daerah masing-masing. Kemudian, dibutuhkan pula sistem dan prosedur yang menjelaskan teknik-teknik pencatatan, penyiapan dokumen, sampai dengan penyusunan laporan keuangan dengan basis akrual penuh. Yang tak kalah penting, pemerintah daerah juga memerlukan dukungan teknologi khususnya aplikasi penatausahaan dan akuntansi yang mengakomodasi basis akrual didalamnya agar implementasi basis akrual ini sesuai dengan harapan.

Kemudian menurut KSAP (2010), persiapan strategi yang dapat dilakukan dalam rangka implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. *Hearing*-standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang dilaksanakan pada desember 2009
2. Sosialisasi dan penyesuaian peraturan yang dilaksanakan pada tahun 2010 hingga 2011 dalam hal ini penyusunan regulasi pemerintah daerah yang meliputi peraturan daerah pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi/sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
3. Penyiapan dan pengembangan SDM akuntansi yang dilaksanakan pada tahun 2010 hingga 2015

Setelah syarat-syarat implementasi dipenuhi, pemerintah dan pemerintah daerah dapat melaksanakan langkah-langkah penerapan basis

akrual di pemerintah daerah. Pada tingkat pusat/nasional, strategi penerapan basis akrual di pemerintah daerah dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

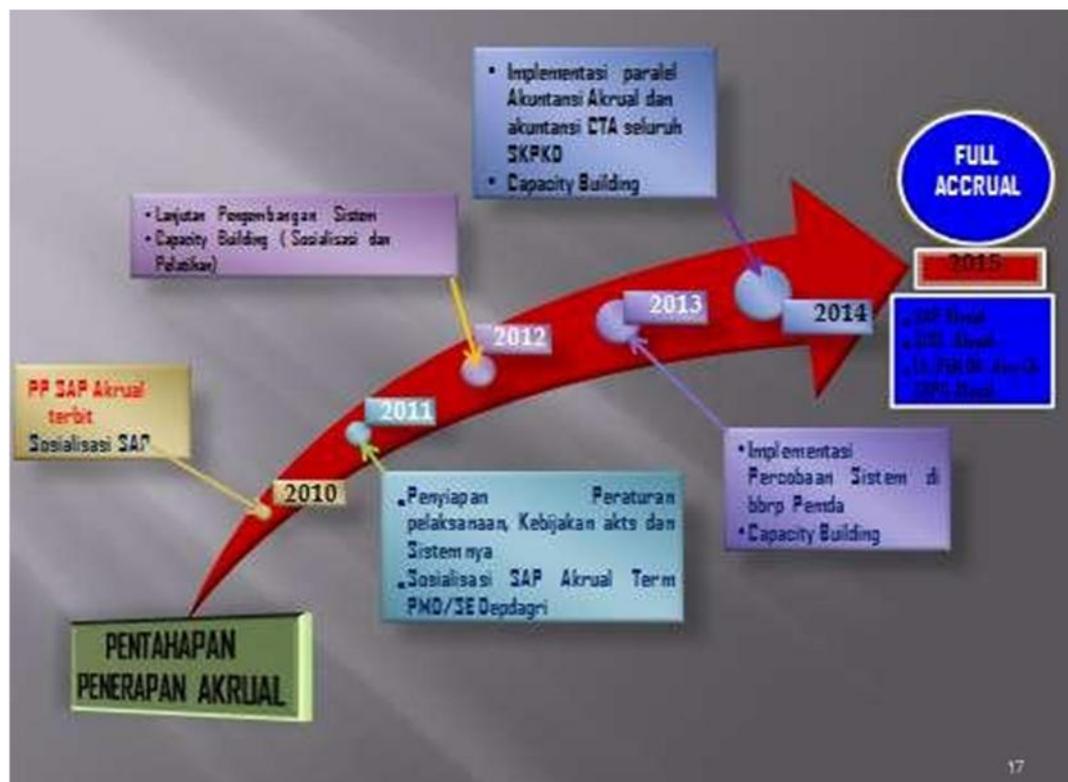
- 1) Menyiapkan pedoman umum pada tingkat nasional tentang akuntansi akrual. Pedoman ini digunakan untuk menyamakan persepsi di semua daerah sekaligus sebagai jembatan teknis atas standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang akan diterapkan.
 - a. Menyiapkan modul pada tingkat nasional yang dapat digunakan oleh berbagai pihak dalam rangka pelatihan akuntansi berbasis akrual.
 - b. Menentukan daerah percontohan di setiap regional sebagai upaya menciptakan *benchmarking*. Dengan cara ini, pemerintah dapat memfokuskan pada beberapa daerah dulu sebelum pada akhirnya dapat digunakan oleh seluruh daerah.
 - c. Diseminasi/sosialisasi tingkat nasional. Selain sebagai usaha penyamaan persepsi dan sosialisasi, cara ini dapat digunakan untuk menyerap *input* berupa saran ataupun keluhan dari daerah terkait penerapan akuntansi basis akrual.

Sementara itu, pada tingkat daerah, strategi penerapan basis akrual dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini:

1. Sosialisasi dan pelatihan yang berjenjang. Berjenjang yang dimaksud meliputi pimpinan level kebijakan sampai dengan pelaksana teknis, dengan tujuan sosialisasi dan pelatihan sebagai berikut: meningkatkan *skill* pelaksana, membangun *awareness*, dan mengajak keterlibatan semua pihak
2. Menyiapkan dokumen legal yang bersifat lokal seperti peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi dan sistem prosedur.

- Melakukan uji coba sebagai tahapan sebelum melaksanakan akuntansi berbasis akrual secara penuh.

Dengan pemahaman yang komprehensif mengenai kondisi mereka serta adanya langkah-langkah strategis untuk mengimplementasikan basis akuntansi yang baru ini, diharapkan pemerintah kita siap mempraktikkan akuntansi berbasis akrual penuh secara benar dan profesional. Oleh karena itu, KSAP (2010) dalam gambar 2.1 memberikan petunjuk atau gambaran yang jelas dalam setiap tahunnya untuk hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah daerah dalam pentahapan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

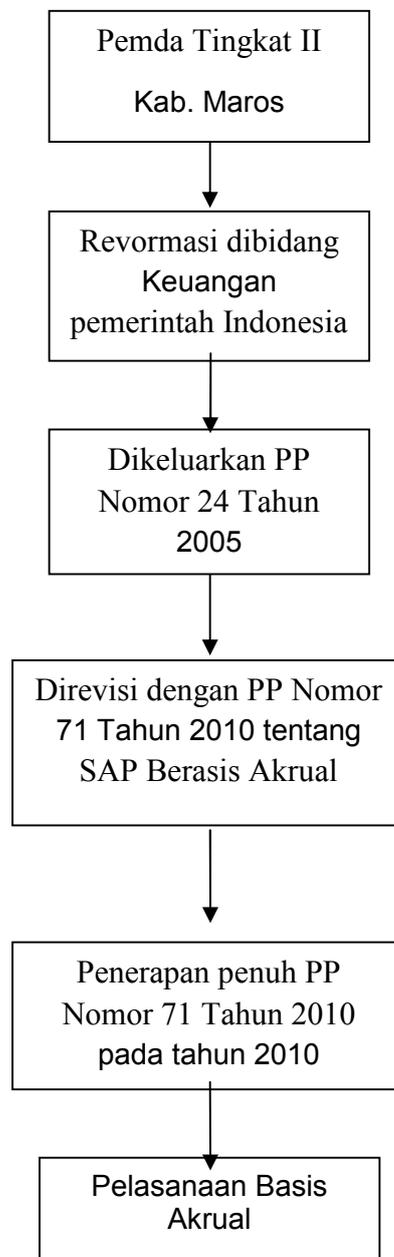


Sumber: KSAP (2010)

Gambar 2.1
Pentahapan Implementasi SAP akrual Pemerintah Daerah

F. Kerangka Pikir

Reformasi dalam bidang keuangan negara telah dimulai sejak tahun 2003 ditandai dengan lahirnya undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara,. Setelah undang-undang tersebut, lalu dikeluarkan PP nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan, kemudian pada tahun 2010 direvisi dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menganut basis akrual secara penuh, yang menggantikan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual menurut PP Nomor 24 Tahun 2005 tersebut akan dimulai pada tahun 2015.. Hal ini sesuai dengan pasal 32 UU No. 17 tahun 2003 yang mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. Dan hal ini ditegaskan dalam pasal 4 ayat (1) PP No. 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual.



Gambar 2.2
KERANGKA PIKIR

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data kuantitatif, adalah jenis data dalam bentuk angka-angka yang diperoleh dari kantor tempat dilakukan penelitian tersebut.
- b. Data Kualitatif, adalah adalah jenis data yang bukan angka, baik secara lisan maupun tulisan.

2. Sumber data terdiri dari :

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data Primer, data ini diperoleh melalui hasil wawancara atau observasi langsung dilapangan.
- b. Data Sekunder, data ini diperoleh melalui hasil pengumpulan informasi dari pihak terkait dalam hal ini badan atau perusahaan terkait.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini, di laksanakan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Maros yang terletak pada Jln. Jendral Sudirman Kompleks Kantor Bupati, Sulawesi Selatan dan jangka waktu penelitian yang digunakan ± selama 1 (satu) bulan terhitung dari bulan April 2017 hingga bulan Mei 2017.

C. Metode Penelitian

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan melalui kepustakaan untuk memperoleh landasan teori terkait penelitian yang dilakukan dengan cara membaca berbagai literatur yang ada hubungannya dengan topik penelitian ini yakni berpacatatan, buku, jurnal dan sebagainya.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

adalah penelitian secara langsung yang diadakan oleh peneliti dengan mengunjungi kantor Bupati Maros dan instansi atau dinas yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti.

D. Metode Pengumpulan data

Dalam penelitian yang akan diadakan metode pengumpulan data yaitu :

1. Dokumentasi

Sugiyono (2010:82) menyatakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen ini merupakan pelengkap. Metode ini juga merupakan suatu proses untuk memperoleh data-data yang terkait dengan realisasi pelaksanaan pemerintah daerah Kabupaten Maros dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah daerah berbasis aktual.

2. Obsevasi

merupakan metode pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.(Ridwan,2004:104)

E. Metode Analisis Data

Metode Deskriptif Kualitatif menurut Sugiyono (2005) menyatakan bahwa metode deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, dan pada akhirnya dirumuskan suatu kesimpulan yang mengacu pada analisis data tersebut.

BAB IV

GAMBARAN UMUM KABUPATEN MAROS

A. Sejarah Singkat Kabupaten Maros

Wilayah Kabupaten Maros pada mulanya adalah suatu wilayah kerajaan yang dikenal sebagai Kerajaan Marusu yang kemudian bernama Kabupaten Maros sampai saat ini. Selain nama Maros, masih terdapat nama lain daerah ini, yakni Marusu dan/atau Buttasalewangan. Ketiga nama tersebut oleh sebagian masyarakat Kabupaten Maros sangat melekat dan menjadikan sebagai lambang kebanggaan tersendiri dalam mengisi pembangunan daerah.

Berdasarkan data-data yang diperoleh, terutama salah satu putra daerah, yakni Andi Fahry Makkasau dari bukunya berjudul “Kerajaan-Kerajaan di Maros Dalam Lintasan Sejarah”, memuat sejarah Kabupaten Maros. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Kabupaten Maros pada awalnya adalah sebuah wilayah kerajaan yang dipengaruhi oleh dua kerajaan besar di Sulawesi Selatan, yakni Kerajaan Bone dan Kerajaan Gowa, yang mana pada waktu itu, Maros memiliki nilai strategis yang sangat potensial. Kabupaten Maros dari dulu hingga saat ini dihuni oleh dua suku, yakni Suku Bugis dan Suku Makassar.

Pada masa kemerdekaan, yakni tujuh tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 oleh pemerintah Republik Indonesia dikeluarkan peraturan No. 34 1952 juncto PP. No. 2/1952 tentang pembentukan Afdelling Makassar yang di dalamnya tercakup Maros.

Secara umum, wilayah Kabupaten Maros memiliki peranan yang sangat besar terhadap pembangunan regional dan nasional melalui peranannya dalam berbagai aspek, yakni :

a. Pusat pelayanan transportasi udara internasional, yakni Bandar Udara Sultan Hasanuddin. Bandar udara ini terletak di Kecamatan Mandai yang merupakan wilayah perbatasan dengan Kota Makassar. Pertumbuhan pelayanan bandar udara Hasanuddin yang begitu pesatnya, sehingga dilakukan pengembangan bandar udara baru dengan luas lahan pengembangan 554,6 Ha. Bandar udara Hasanuddin merupakan wilayah pintu gerbang Sulawesi Selatan dan KTI yang mengindikasikan bahwa Kabupaten Maros adalah gerbang utama pembangunan regional dan nasional.

b. Pusat Penelitian Pertanian, yakni dengan adanya pengembangan Balai Penelitian Tanaman Sereal dan Tanaman Pangan yang berlokasi di Kecamatan Turikale. Balai penelitian ini melakukan serangkaian penelitian untuk menghasilkan inovasi teknologi pertanian sekaligus mendiseminasikan secara terarah guna mendukung upaya peningkatan produksi pertanian sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Selatan. Riset tentang potensi kelautan dan perikanan. Hal ini sangat mendasar karena wilayah Kabupaten Maros sebagai daerah pesisir dengan kontribusi pada sektor perikanan di Sulawesi Selatan cukup besar, terutama dalam memenuhi kebutuhan wilayah Kota Makassar sebagai ibukota provinsi Sulawesi Selatan. Disamping itu, kegiatan perikanan yang diusahakan dan dikembangkan oleh masyarakat Kabupaten Maros adalah perikanan budidaya air payau yang mencapai luas tambak 9.461,53 Ha.

c. Militer, yaitu wilayah Kabupaten Maros merupakan wilayah yang dijadikan sebagai Pusat Pelatihan dan Pendidikan TNI-AD, yaitu dengan adanya kawasan pelatihan dan pendidikan Kostrad TNI-AD. Lokasi kegiatan ini berlokasi pada dua kecamatan, yakni Sambueja Kecamatan Bantimurung dan Kariango Kecamatan Tanralili. Disamping itu, Kecamatan Mandai juga di jadikan sebagai pangkalan udara TNI Angkatan Udara yang berlokasi di Bandar Udara Sultan Hasanuddin.

d. Pusat Kegiatan Keagamaan, yakni suatu kegiatan yang dilakukan oleh jamaah Halwatiah Sammang. Pada setiap hari besar Maulid Nabi Muhammad SAW, jamaah Halwatiah Sammang bersatu melakukan sikir akbar yang berlokasi di Patte'ne Kecamatan Marusu. Asal jamaah Halwatiah Sammang tersebut telah tersebar diseluruh nusantara, bahkan ada yang berasal dari Malaysia.

e. Bagian Wilayah Pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata, yaitu suatu kebijakan pengembangan wilayah yang pertama di KTI, dimana sebagian wilayah Kabupaten Maros masuk dalam Kawasan Perkotaan Metropolitan tersebut. Wilayah Kecamatan yang masuk dalam pengembangan ini adalah Kecamatan Mandai, Moncongloe, Tompobulu, Bantimurung, Marusu, Turikale, Tanralili, Lau, Maros Baru, Simbang, Bantimurung, dan Bontoa. Dari luas wilayah pengembangan Kawasan Mamminasata sebesar 2.462 Km², wilayah Kabupaten Maros yang menjadi bagian kawasan pengembangan tersebut adalah 1.039 Km² atau 42,20%. Hal ini tentunya sangat memberi manfaat bagi wilayah Kabupaten Maros ditinjau dari segi penyediaan dan pembangunan infrastruktur, penyediaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, PAD dan lain sebagainya.

B. Kondisi Geografis Daerah

1. Batas Administratif

Secara geografis, Kabupaten Maros terletak antara 04° 45' - 05° 07' Lintang Selatan dan 109° 205'- 129° 12' Bujur Timur yang berbatasan dengan:

Sebelah Utara	:	Kabupaten Pangkep;
Sebelah Timur	:	Kabupaten Bone;
Sebelah Tenggara	:	Kabupaten Gowa;
Sebelah Selatan	:	Kota Makassar;
Sebelah Barat	:	Selat Makassar.

Letaknya yang sangat strategis dan berbatasan langsung dengan kota Makassar menjadikan Kabupaten Maros termasuk dalam bagian wilayah pengembangan kawasan Metropolitan Mamminasata. Wilayah kecamatan yang termasuk dalam pengembangan ini adalah Kecamatan Mandai, Moncongloe, Tompobulu, Bantimurung, Marusu, Turikale, Tanralili, Lau, Maros Baru, Simbang, Bantimurung, dan Bontoa.

2. Luas Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Maros tercatat 1.619,12 km² yang secara administratif terdiri dari 14 kecamatan, dan 80 desa serta 23 kelurahan. Berdasarkan data yang ada, diketahui kecamatan terluas adalah Kecamatan Tompobulu dengan luas 287,66 km² atau 17,77 % dari luas Kabupaten Maros. Adapun kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Turikale dengan luas 29,93 km² atau hanya 1,85 % dari luas wilayah Kabupaten Maros

yang merupakan pusat kota kabupaten. Iklim Kabupaten Maros termasuk iklim tropis, dengan curah hujan di atas 600 mm dan interval suhu udara 19,60°C-36,60°C, dengan kelembaban rata-rata 81,08%.

3. Topografi

Topografi Kabupaten Maros sangat bervariasi, mulai dari wilayah datar sampai wilayah pegunungan. Luas daerah kondisi datar sekitar 70.882 Ha atau 43,80% dari luas Kabupaten Maros. Sedangkan, daerah yang mempunyai kemiringan lereng di atas 40% atau wilayah yang bergunung-gunung mempunyai luas 49.869 Ha atau sebesar 30,80% dari luas wilayah Kabupaten Maros.

C. Visi dan Misi

Proses pembangunan yang berlangsung selama ini, tidak hanya menghasilkan kemajuan dan keberhasilan, tetapi juga menyisakan banyak permasalahan baik permasalahan yang mendasar maupun permasalahan yang berkembang dewasa ini. Meskipun demikian, berbagai permasalahan mendasar menuntut perhatian khusus dalam membangun ke depan, diantaranya adalah keprihatinan dalam menghadapi masa depan serta rentannya sistem pembangunan dalam menghadapi perubahan dan pengembangan yang berkelanjutan.

Permasalahan mendasar ini perlu ditangani secara berkelanjutan baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan baru yang berkembang dewasa ini harus pula merupakan langkah awal pemecahan mendasar tersebut.

Berdasarkan permasalahan, tantangan, serta keterbatasan yang dihadapi Kabupaten Maros, maka ditetapkan Visi Pembangunan tahun 2016-2021, yaitu :

" Maros Lebih Sejahtera 2021 "

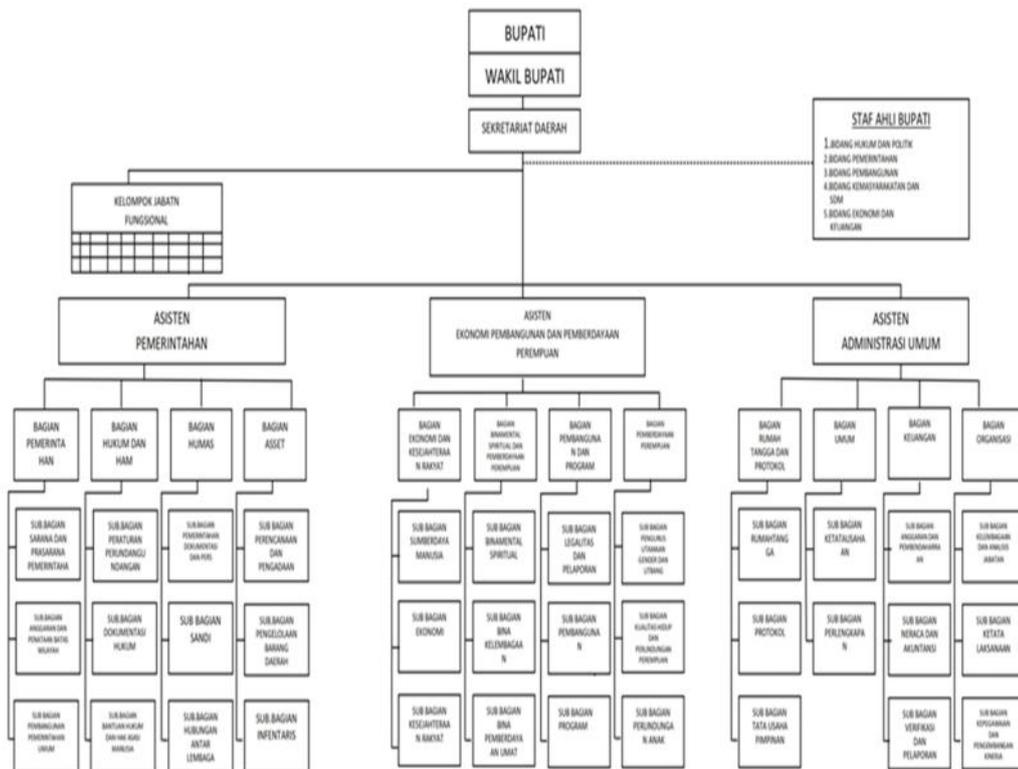
Yang dimaksud Lebih Sejahtera yaitu suatu kondisi masyarakat Kabupaten Maros pada tahun 2021 yang lebih baik dari kondisi sekarang, pada seluruh sektor kehidupan masyarakat dan ditandai dengan; 1) terpenuhinya hak dasar masyarakat seperti; Kecukupan Pangan, Papan, dan Sandang yang bermutu, kecukupan kebutuhan dan ketersediaan akan layanan pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, lingkungan yang bersih, aman, damai, dan nyaman serta akses untuk berpartisipasi; 2) Tersedianya infrastruktur dasar pendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah yang lebih berkualitas dan merata; 3) Terjaminnya penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka *Good Governance And Clean Government*. Agar visi tersebut dapat diwujudkan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada, maka sangatlah perlu dilakukan sinergi yang dinamis antara, masyarakat, pemerintah dan swasta/dunia usaha serta seluruh stakeholders secara terpadu.

Untuk memenuhi dan merealisasikan visi tersebut, pemerintah Kabupaten Maros mencanangkan misi. Misi dalam hal ini adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Misi yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Maros adalah sebagai berikut;

1. Meningkatkan Perekonomian Daerah
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat
4. Meningkatkan Pembangunan Wilayah dan Kawasan
5. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Teknologi Informatika

D. Struktur Organisasi

1. Bagan Struktur Organisasi Kabupaten Maros



BUPATI MAROS,

Ir. H.M. HATTA RAHMAN, MM

Gambar 4.1
Bagan Struktur Organisasi Kabupaten Maros

2. Tugas dan Fungsi

- **Bupati**

Adapun tugas dan fungsinya yaitu :

1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
3. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
4. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. mengusulkan pengangkatan Wakil Bupati;
6. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Wakil Bupati**

Adapun tugas dan fungsinya yaitu :

- Membantu Bupati dalam :
 1. memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 2. mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
 3. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten dan Nagari;
- memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
- melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Sekretariat Daerah** mempunyai tugas dan kewajiban membantu bupati dan

fungsi :

 1. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah.
 2. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
 3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah.
 4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah.
 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Asisten Pemerintahan meliputi :
 1. Bagian Pemerintahan terdiri dari :
 - a. Sub Bagian sarana dan prasarana pemerintahan
 - b. Sub Bagian Agraria dan Penataan Batas Wilayah;
 - c. Sub Bagian Pembinaan Pemerintahan Umum.
 2. Bagian Hukum dan HAM terdiri dari : :
 - a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
 - c. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 3. Bagian Humas terdiri dari : :
 - a. Sub Bagian Pemberitaan, Dokumentasi dan Pers;
 - b. Sub Bagian Sandi ;
 - c. Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga
 4. Bagian Aset terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pengadaan
 - b. Sub Bagian Pengelolaan Barang Daerah
 - c. Sub Bagian Inventaris
- **Asisten Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan** meliputi :
 1. Bagian Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Sumber Daya Manusia
 - b. Sub Bagian Ekonomi
 - c. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat

BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Maros

Dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua kalinya menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011, dijelaskan bahwa, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Sesuai dengan amanah Permendagri 13 Tahun 2006 tentang sistem pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dilaksanakan berdasarkan sistem anggaran yang berbasis kinerja. Dimana dengan sistem penganggaran yang berbasis kinerja, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan akan lebih baik melalui pemenuhan prinsip-prinsip dasar antara lain penegakan hukum, partisipatif, transparan dan akuntabel.

1. Peraturan Bupati Maros Nomor 37 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Maros

Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Maros untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan baik secara internal maupun eksternal. Ruang lingkup kebijakan akuntansi ini terdiri atas :

1) kerangka konseptual kebijakan akuntansi. Kerangka konseptual kebijakan akuntansi ini membahas:

- a. tujuan kerangka konseptual kebijakan akuntansi
- b. lingkungan akuntansi pemerintahan
- c. pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna
- d. entitas akuntansi dan entitas pelaporan
- e. peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan serta dasar hukum
- f. asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi, dan
- g. unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan, dan pengukurannya.

2) penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam kebijakan akuntansi lainnya. Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

- c. Neraca
- d. Laporan Operasional
- e. Laporan Arus Kas
- f. Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Catatan atas Laporan Keuangan

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan, kecuali:

- a. Laporan arus kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum
 - b. Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.
- 3) laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan Pemerintah Kabupaten Maros dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikator perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:
- a. telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan hemat
 - b. telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD), dan
 - c. telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

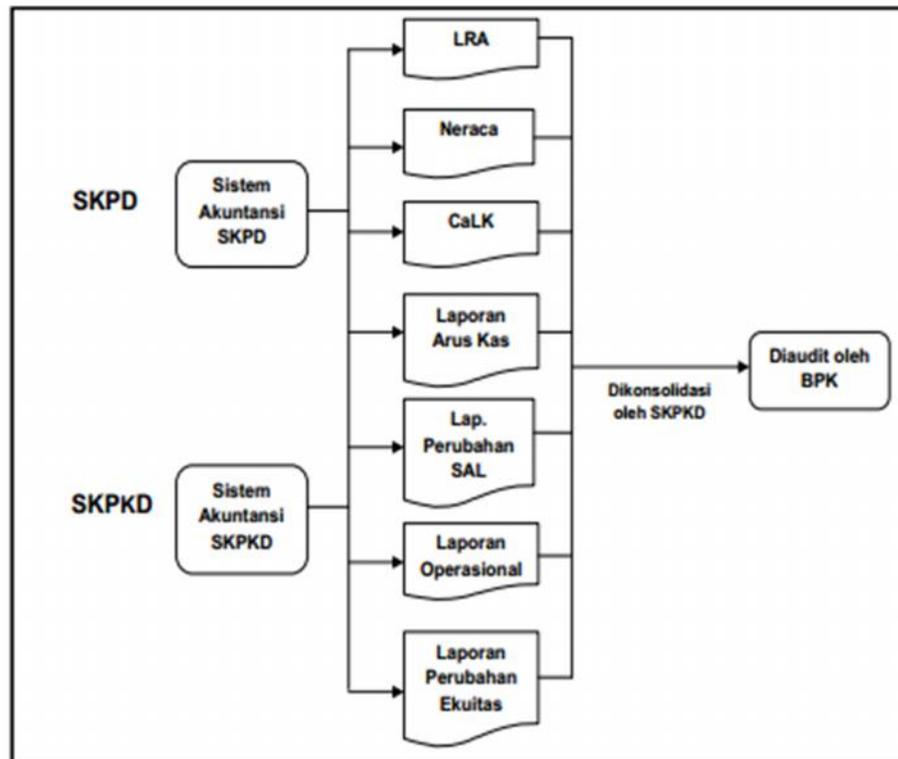
- 4) Laporan operasional
- 5) Laporan arus kas
- 6) Catatan atas laporan keuangan
- 7) Akuntansi persediaan
- 8) Akuntansi investasi
- 9) Akuntansi asset tetap
- 10) Akuntansi konstruksi dalam pengerjaan
- 11) Akuntansi kewajiban
- 12) Koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan
- 13) Laporan keuangan konsolidasian.

B. Sistem Akuntansi Berbasis Akrua di Kabupaten Maros

Peraturan Bupati Maros Nomor 38 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Maros

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. Sistem akuntansi SKPD. Sistem akuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.
- b. Sistem Akuntansi PPKD. Sistem Akuntansi PPKD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah.
- c. BAS (Bagan Akun Standar). Bagan Akun Standar menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodifikasi mencakup akun-akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap.



Sumber: BPKAD Kab. Maros- Akuntansi SKPD & Pelaporan Keuangan

Gambar 5.4

Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Basis Akrual

- Sistem akuntansi SKPD

Hanya memiliki kewajiban untuk menyusun lima laporan, yaitu

-Laporan Realisasi Anggaran

-Neraca

-Catatan atas Laporan Keuangan.

-Laporan Operasional

-Laporan Perubahan Ekuitas, sedangkan

- Sistem Akuntansi SKPKD

Dapat menyusun satu set laporan keuangan yaitu :

-Laporan Realisasi Anggaran

-Neraca

-Catatan atas Laporan Keuangan.

-Laporan Arus Kas

-Laporan Perubahan Saldo Anggaran

-Laporan Operasional

-Laporan Perubahan Ekuitas,

Kemudian di konsolidasi (gabung) dari 2 sistem tersebut dan selanjutnya yg terakhir diaudit oleh BPK.

C. Bentuk Dan Susunan Laporan Keuangan Pemerintah Maros

Berikut akan di sajikan Bentuk dan Susunan laporan Keuangan

Pemerintah yang digunakan terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang meliputi :

1. Ketaatan terhadap APBN/APBD
2. Informasi tentang realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit LRA
3. Pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran karena menyediakan informasi-informasi sebagai berikut :

1. Informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
2. Informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisien dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Setiap komponen dalam LRA dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut atas angka-angka yang dianggap perlu dijelaskan.

Tabel 5.1

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2016

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2016

NO	URAIAN	TAHUN 2016		REALISASI 2015
		ANGGARAN	REALISASI	
1	PENDAPATAN – LRA			
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
3	Pendapatan Pajak Daerah	78.551.000.000,00	70.683.640.411,95	64.898.605.475,05
4	Pendapatan Retribusi Daerah	64.503.500.000,00	55.681.806.762,43	50.622.503.178,88
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yg dipisahkan	10.314.224.400,00	10.314.224.366,00	6.267.571.943,98
6	Lain-Lain PAD Yang Sah	22.750.000.000,00	28.344.197.087,78	19.699.005.007,54
7	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (3 s/d 6)	176.118.724.400,00	165.023.868.628,16	141.487.685.605,45
8	PENDAPATAN TRANSFER			
9	Transfer Pem Pusat - Dana Perimbangan			
10	Bagi Hasil Pajak	22.387.967.000,00	23.149.679.642,00	17.341.562.150,00

11	Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.101.573.000,00	4.400.802.227,00	1.840.245.234,00
12	Dana Alokasi Umum	704.125.166.000,00	704.125.166.000,00	645.209.768.000,00
13	Dana Alokasi Khusus	412.020.694.000,00	335.455.226.668,00	95.401.330.000,00
14	Jumlah Pendapatan Trasfer - dana Perimbangan (10 s/d 13)	1.143.635.400.000,00	1.067.130.874.537,0 0	759.792.905.384,00
15	Pendapatan Pemerintah Pusat - Lainnya			
16	Dana Otonomi Khusus	-	-	-
17	Dana penyesuaian	6.409.727.000,00	6.568.247.000,00	149.285.757.000,00
18	Dana Desa	52.677.296.000,00	52.677.296.000,00	23.469.704.000,00
19	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (16s/d 18)	59.087.023.000,00	59.245.543.000,00	172.755.461.000,00
20	Transfer Pemerintah Provinsi			
21	Bagi Hasil Pajak	66.307.705.041,00	53.811.282.310,60	51.388.884.608,00
22	Bagi Hasil lainnya	13.587.404.802,00	5.841.576.800,00	7.589.979.600,00
23	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (21 s/d 22)	79.895.109.843,00	59.652.859.110,60	58.978.864.208,00
24	Jumlah Pendapatan Transfer (14+19+23)	1.282.617.532.843,00	1.186.029.276.647,6 0	991.527.230.592,00
25	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			
26	Pendapatan Hibah	23.049.973.217,00	23.049.973.219,00	932.000.000,00
27	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-
28	Pendapatan Lainnya	-	-	-
29	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH (25s/d 27)	23.049.973.217,00	23.049.973.219,00	932.000.000,00
30	JUMLAH PENDAPATAN DAN TRANSFER (7+24+30)	1.481.786.230.460,00	1.374.103.118.494,7 6	1.133.946.916.197,4 5
31	BELANJA			
32	BELANJA OPERASI			
33	Belanja Pegawai	596.572.587.828,00	588.796.479.859,00	527.259.136.234,00
34	Belanja Barang dan Jasa	254.479.240.854,00	208.790.027.125,00	165.115.313.144,00
35	Belanja Bunga	-	-	-
36	Belanja Subsidi	-	-	-
36	Belanja Hibah	16.502.258.800,00	13.755.903.200,00	57.047.147.873,00
37	Belanja Bantuan Sosial	300.000.000,00	-	450.000.000,00
38	JUMLAH BELANJA OPERASI (33s/d 37)	867.854.087.482,00	811.342.410.184,00	749.871.597.251,00
39	BELANJA MODAL			

40	Belanja Modal Tanah	5.518.809.275,00	1.448.770.000,00	6.993.328.488,00
41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.800.888.517,00	45.224.411.782,00	39.299.476.604,00
42	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	80.395.899.817,00	69.220.926.880,00	119.256.011.812,00
43	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	324.693.123.705,00	305.796.283.790,00	157.823.831.433,00
44	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	749.859.000,00	749.859.000,00	2.320.650.500,00
45	Belanja Aset Lainnya	-	-	-
46	JUMLAH BELANJA MODAL (40s.d 45)	462.158.580.314,00	422.440.251.452,00	325.693.298.837,00
47	BELANJA TAK TERDUGA			
48	Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	665.121.750,00	383.500.000,00
49	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA (48)	1.000.000.000,00	665.121.750,00	383.500.000,00
50	JUMLAH BELANJA (38+46+49)	1.331.012.667.796,0 0	1.234.447.783.386,00	1.075.948.396.088,0 0
51	TRANSFER			
52	TRANSFER BAGI HASIL KEDESA			
53	Bagi Hasil Pajak	-	-	42.867.401.982,00
54	Bagi Hasil Retribusi	-	-	
55	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	844.287.483,00
56	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN			
57	Bantuan Keuangan Desa	125.648.509.700,00	103.957.273.710,00	-
58	Bantuan Keuangan Lainnya	988.157.300,00	807.768.287,00	-
59	JUMLAH TRANSFER (53 s.d 58)	126.636.667.000,00	104.765.041.997,00	43.711.689.465,00
60	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (50 + 59)	1.457.649.334.796,0 0	1.339.212.825.383,00	1.119.660.085.553,0 0
61	SURPLUS / (DEFISIT) (30-60)	24.136.895.664,00	34.890.293.111,76	14.286.830.644,45
62	PEMBIAYAAN			
63	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
64	Penggunaan SILPA	26.775.077.553,00	26.035.703.634,64	19.504.937.929,79
65	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-
66	Pinjaman Dalam negeri	-	-	-
67	Penerimaan kembali Pinjaman Daerah	-	-	-
68	Penerimaan kembali Piutang Daerah	-	-	-
69	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (64s.d68)	26.775.077.553,00	26.035.703.634,64	19.504.937.929,79
70	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			

71	Penyertaan Modal Pemerintah daerah	25.050.973.217,00	25.049.973.219,00	5.000.000.000,00
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri			
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya	25.861.000.000,00	15.754.781.329,00	2.756.064.940,00
74	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (71s.d73)	50.911.973.217,00	40.804.754.548,00	7.756.064.940,00
		-	-	-
75	PEMBIAYAAN NETTO (69-74)	(24.136.895.664,00)	(14.769.050.913,36)	11.748.872.989,79
77	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (61-75)	-	20.121.242.198,40	26.035.703.634,24

Sumber: *Data Laporan Keuangan Kabupaten Maros*

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos berikut, yaitu :

1. Saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya)
2. Penggunaan saldo anggaran lebih
3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan
4. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya
5. Lain-lain dan saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan.

Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelum LP-SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Struktur LP-SAL tidak memiliki perbedaan baik pada Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Tabel 5.2
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Maros Tahun
Anggaran 2016

PEMERITAH KABUPATEN MAROS
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

NO	URAIAN	Tahun 2016	Tahun 2015
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	26.035.703.634,64	19.504.937.929,79
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	26.035.703.634,64	(19.504.937.929,79)
3	Sub Total (1-2)	-	-
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPSA)	20.121.242.198,40	26.035.703.634,64
5	Sub Total (3 + 4)	20.121.242.198,40	26.035.703.634,64
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun 2015	-	-
7	Lain-lain	-	-
	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6)	20.121.242.198,40	26.035.703.634,64

Sumber: *Data Laporan Keuangan Kabupaten Maros*

3. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan.

Tabel 5.3

Laporan Operasional (LO) Pemerintah Kabupaten Maros

PEMERITAH KABUPATEN MAROS

LAPORAN OPERASIONAL

PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

NO	URAIAN	TAHUN 2016	TAHUN 2015
1	PENDAPATAN – LO		
2	PENDAPATAN ASLIDAERAH		
3	Pendapatan Pajak Daerah	79.664.720.294,88	69.471.060.975,88
4	Pendapatan Retribusi daerah	59.074.192.500,59	52.629.406.891,79
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	10.314.224.366,00	6.267.571.943,98
6	Lain-lain PAD Yang Sah	27.788.182.787,78	18.876.889.003,57
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3s.d 6)	176.841.319.949,25	147.244.928.815,22
8	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN		
9	Dana Bagi Hasil Pajak	23.149.679.642,00	17.341.562.150,00
10	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	4.400.802.227,00	1.840.245.234,00
11	Dana Alokasi Umum	704.125.166.000,00	645.209.768.000,00
12	Dana Alokasi Khusus	335.455.226.668,00	95.401.330.000,00
13	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah -Dana Perimbangan (9s.d12)	1.067.130.874.537,00	759.792.905.384,00
14	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA		
15	Dana Otonomi Khusus	-	-
16	Dana Penyesuaian	6.568.247.000,00	149.285.757.000,00
17	Dana Desa	52.677.296.000,00	23.469.704.000,00
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (15s.d 17)	59.245.543.000,00	172.755.461.000,00
19	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI		
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	55.408.723.421,60	62.719.490.298,40
21	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.841.576.800,00	7.589.979.600,00
22	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (20s.d 21)	61.250.300.221,60	70.309.469.898,40
23	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER (13+18+22)	1.187.626.717.758,60	1.002.857.836.282,40
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		
25	Pendapatan Hibah	83.145.320.041,00	53.195.075.394,00

26	Pendapatan Dana Darurat	-	-
27	Pendapatan Lainnya	-	90.041.189,26
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah (24s.d 27)	83.145.320.041,00	53.285.116.583,26
29	JUMLAH PENDAPATAN (7+23+28)	1.447.613.357.748,85	1.203.387.881.680,88
30	BEBAN –LO		
31	BEBAN		
32	Beban Pegawai	595.889.510.614,00	533.378.504.473,00
33	Beban Persediaan	17.060.380.168,77	19.558.422.820,20
34	Beban Barang dan Jasa	211.164.757.604,98	168.325.592.741,20
35	Beban Pemeliharaan	1.011.161.500,00	224.870.000,00
36	Beban Perjalanan Dinas	13.799.925.931,00	13.365.036.441,00
37	Beban Bunga	-	-
38	Beban Subsidi	-	-
39	Beban Hibah	15.604.698.900,00	62.864.759.373,00
40	Beban Bantuan Sosial	-	450.000.000,00
41	Beban Penyusutan dan amortisasi	103.812.548.384,36	72.959.811.290,41
42	beban penyisihan Piutang	3.638.502.603,42	8.207.604.710,36
43	Beban Transfer	104.765.041.997,00	43.711.689.465,00
44	Beban lain-lain	8.382.504.878,45	11.302.603.644,22
45	JUMLAH BEBAN (41+48)	1.075.129.032.581,98	934.348.894.958,39
46	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (29 - 45)	372.484.325.166,87	269.038.986.722,49
47	SURPLUS DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-
48	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	-	-
49	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-
50	Defisit penjualan Aset Non Lancar	-	-
51	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-
52	Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional lainnya	2.193.611.370,80	(20.567.677.702,71)
53	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERSIONAL	2.193.611.370,80	(20.567.677.702,71)
54	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (46+53)	374.677.936.537,67	248.471.309.019,78
55	POS LUAR BIASA		
56	Pendapatan Luar Biasa	-	-
57	Beban Luar Biasa	665.121.750,00	383.500.000,00
58	Pos Luar Biasa (56s.d57)	(665.121.750,00)	(383.500.000,00)
59	SURPLUS/DEFISIT (54+58)	374.012.814.787,67	248.087.809.019,78

Sumber: Data Laporan Keuangan Kabupaten Maros

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas tahun sebelumnya, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-

koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

- Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;

Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. Di samping itu, suatu entitas pelaporan juga menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Tabel 5.4

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Pemerintah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2016

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2016

(dalam Rupiah)

URAIAN	REFF	TAHUN 2016	TAHUN 2015
	CALK		
Ekuitas Awal	5.1.3.1	1.760.449.072.082,83	1.159.235.564.274,16
Surplus – LO	5.1.3.2	374.012.814.787,67	248.087.809.019,78
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Mendasar	5.1.3.3	(1.960.638.498,49)	353.125.678.788,75
Koreksi Nilai Persediaan			-
Selisih Revaluasi Aset Tetap			-
Koreksi Ekuitas Lainnya			353.125.678.788,75
Koreksi Pencatatan aset Tetap Tahun sebelumnya			350.254.666.038,64

Koreksi Saldo Awal Piutang menara telekomunikasi (Piutang 2014 belum dicatat)			(838.543.454,24)
Koreksi tambah Aset Tetap untuk gedung dan bangunan dari koreksi data utang 2015			1.722.186.700,00
Koreksi tambah aset tetap untuk belanja Hibah pada tahun anggaran 2014(Kesalahan Anggaran TA.2014)			299.560.050,00
Koreksi tambah aset tetap untuk jalan, irigasi dan jaringan dari koreksi data utang 2015			6.799.370.000,00
koreksi tambah KDP dikarenakan belum dicatat			673.871.000,00
Koreksi tambah atas utang jangka pendek			(1.797.951.084,00)
Koreksi kurang atas utang jangka pendek			(3.358.950,00)
Koreksi kurang persediaan Alkes			1.870.991,20
Koreksi penyertaan modal PDAM			1.108.078.272,07
Koreksi kurang persediaan obat-obatan saldo awal Tahun 2015			(5.042.464.206,66)
Koreksi kurang persediaan Alat kesehatan saldo awal Tahun 2015			(1.645.402,00)
Koreksi tambah persediaan obat-obatan			1.479.991,60
Koreksi saldo awal beban penyusutan 2015			(191.993.597,86)
2015			140.552.440,00
Koreksi saldo awal kas lainnya Dana BOS		(337.106.829,00)	-
koreksi penyisihan Piutang		120.902.669,17	-
Koreksi saldo awal gedung dan bangunan Sekda		(20.000,50)	-
Koreksi saldo awal Akumulasi penyusutan Aset Tetap		373.469.261,99	-
Koreksi tambah atas investasi (Penyertaan Modal di PDAM)		(2.123.006.595,48)	-
Koreksi Utanga Jangka Pendek lainnya		(0,20)	-
Koreksi Aset tetap belum tercatat		5.123.000,00	-
Koreksi Ekuitas lainnya Pembulatan		(4,47)	-
EKUITAS AKHIR	5.1.3.4	2.132.501.248.372,01	1.760.449.052.082,69

Sumber: *Data Laporan Keuangan Kabupaten Maros*

5. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta

mengklasifikasikan kewajiban menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Neraca setidaknya menyajikan pos-pos berikut:

1. Kas dan setara kas
2. Investasi jangka pendek
3. Piutang pajak dan bukan pajak
4. Persediaan
5. Investasi jangka panjang
6. Aset tetap
7. Kewajiban jangka pendek
8. Kewajiban jangka panjang
9. Ekuitas

Tabel 5.5

Neraca Pemerintah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2016

**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
NERACA
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REFF CALK	31 DESEMBER 2016	31 DESEMBER 2015
1	2	3	4	5
1	A S E T	5.1.4.1		
2	ASET LANCAR			
3	Kas di Kas Daerah		14.122.121.000,40	21.938.591.378,64
4	Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	3.200.500,00
5	Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	-
6	Kas di Bendahara Kapitasi JKN		5.999.121.198,00	4.093.911.756,00

7	Kas Lainnya		169.507.385,00	739.373.918,00
8	Investasi Jangka Pendek		0,00	-
9	Piutang Pajak		29.703.503.964,69	20.618.905.868,85
10	Piutang Retribusi		8.761.473.757,24	5.190.197.903,24
11	Piutang Bagi Hasil Provinsi		12.928.046.801,00	
12	Beban Dibayar Dimuka		0,00	-
13	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		10.219.616,00	3.773.568,00
14	Piutang Lainnya		803.686.000,00	12.649.607.690,00
15	Penyisihan Piutang		(6.641.753.393,28)	(4.590.055.597,60)
16	Persediaan		8.345.348.467,25	7.886.146.116,82
17	Jumlah Aset Lancar (3 s.d 16)		74.201.274.796,30	68.533.653.101,95
18	INVESTASI JANGKA PANJANG			
19	Investasi Non Permanen			
20	Pinjaman Jangka Panjang		0,00	0,00
	Investasi dalam surat utang			
21	Negara		0,00	0,00
	Investasi dalam Proyek			
22	Pembangunan		0,00	0,00
23	Investasi Non Permanen Lainnya		0,00	0,00
24	Jumlah Investasi Non Permanen (20 s.d 23)		0,00	0,00
25	Investasi Permanen			
	Penyertaan Modal Pemerintah			
26	Daerah		49.035.044.896,59	26.108.078.273,07
27	Investasi Permanen Lainnya		0,00	0,00
28	Jumlah Investasi Permanen (26 s.d 27)		49.035.044.896,59	26.108.078.273,07
29	Jumlah Investasi Jangka Panjang (24+28)		49.035.044.896,59	26.108.078.273,07
30	ASET TETAP			
31	T a n a h		547.852.590.901,96	544.120.759.949,27
32	Peralatan dan Mesin		307.459.703.082,34	252.542.435.008,34
33	Gedung dan Bangunan		755.151.176.221,80	694.922.022.843,68
34	Jalan, Irigasi dan Jaringan		1.323.430.513.251,11	1.021.928.912.685,92
35	Aset Tetap Lainnya		14.156.382.948,50	8.709.024.335,49
36	Konstruksi dalam Pengerjaan		70.843.257.603,98	60.340.688.699,48
37	Akumulasi Penyusutan		(993.687.473.224,45)	(891.353.160.501,08)
38	Jumlah Aset Tetap (31 s.d 37)		2.025.206.150.785,24	1.691.210.683.021,10
39	DANA CADANGAN			
40	Dana Cadangan		0,00	0,00
41	Jumlah Dana Cadangan (40)		0,00	0,00
42	ASET LAINNYA			
43	Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00

	Penyisihan Tagihan Penjualan			
44	Angsuran		0,00	0,00
	Tagihan Penjualan Angsuran			
45	Netto		0,00	0,00
46	Tuntutan Ganti Rugi		5.778.514.816,68	6.289.368.664,68
47	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi		(4.619.741.751,33)	(3.617.549.112,76)
48	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
49	Aset Tak Berwujud		1.483.008.048,00	1.483.008.048,00
	Akumulasi Amortisasi Aset Tak			
50	Berwujud		(1.104.766.399,00)	0,00
51	Aset Lain-Lain		12.073.932.689,22	11.787.018.308,33
52	Jumlah Aset Lainnya (43 s.d 51)		13.610.947.403,57	15.941.845.908,25
53	JUMLAH ASET (17+29+38+41+52)		2.162.053.417.881,70	1.801.794.260.304,37
54	K E W A J I B A N	5.1.4.2		
55	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga			
56	(PFK)		-	0,00
57	Utang Kepada BPJS Kesehatan		13.692.967.369,00	13.692.967.369,00
58	Utang Kepada PT Taspen			795.364.527,00
	Bagian Lancar Utang Jangka			
59	Panjang		-	0,00
60	Pendapatan Diterima Dimuka		499.680.465,25	217.272.136,50
61	Utang Beban		1.176.136.783,00	906.917.799,00
62	Utang Jangka Pendek lainnya		14.183.384.892,44	25.732.666.390,04
63	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (Jumlah 56 s.d 62)		29.552.169.509,69	41.345.188.221,54
64	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
	Utang Dalam Negeri - Sektor			
65	Perbankan		-	0,00
66	Utang Dalam Negeri - Obligasi		-	0,00
	Utang Dalam Negeri - Pemerintah			
67	Pusat		-	0,00
68	Utang Pemerintah Daerah Lainnya		-	0,00
69	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (Jumlah 65 s.d 68)		-	0,00
70	JUMLAH KEWAJIBAN (63 + 68)		29.552.169.509,69	41.345.188.221,54
71	EKUITAS	5.1.4.3		
72	Ekuitas		2.132.501.248.372,01	1.760.449.072.082,83
73	JUMLAH EKUITAS (72)		2.132.501.248.372,01	1.760.449.072.082,83
74	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (Jumlah 70 + 73)		2.162.053.417.881,70	1.801.794.260.304,37

Sumber: Data Laporan Keuangan Kabupaten Maros

6. Laporan Arus Kas

Pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum atau unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara/daerah dan/atau kuasa bendaharawan umum negara/daerah. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Tabel 5.6

Laporan Arus Kas (LAK) Pemerintah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2016

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

Dalam Rupiah

	U R A I A N	TAHUN 2015	TAHUN 2016
	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
2	ARUS MASUK KAS		
3	Penerimaan Pajak Daerah	70.683.640.411,95	64.898.605.475,05

4	Penerimaan Retribusi Daerah	55.681.806.762,43	50.622.503.178,88
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.314.224.366,00	6.267.571.943,98
6	Penerimaan Lain-lain PAD	28.344.197.087,78	19.699.005.007,54
7	Penerimaan Bagi Hasil Pajak	23.149.679.642,00	17.341.562.150,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	4.400.802.227,00	1.840.245.234,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	704.125.166.000,00	645.209.768.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	335.455.226.668,00	95.401.330.000,00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian	6.568.247.000,00	149.285.757.000,00
12	Penerimaan Dana Desa	52.677.296.000,00	23.469.704.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	53.811.282.310,60	51.388.884.608,40
14	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.841.576.800,00	7.589.979.600,00
15	Penerimaan Hibah	23.049.973.219,00	932.000.000,00
16	Penerimaan Dana Darurat	-	-
17	Penerimaan Pendapatan Lainnya	-	-
18	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	-	-
19	Jumlah Arus Masuk Kas (1s.d18)	1.374.103.118.494,76	1.133.946.916.197,85
20	ARUS KELUAR KAS		
21	Pembayaran Pegawai	588.796.479.859,00	527.259.136.234,00
22	Pembayaran Barang	208.790.027.125,00	165.115.313.144,00
23	Pembayaran Bunga	-	-
24	Pembayaran Hibah	13.755.903.200,00	57.047.147.873,00
25	Pembayaran Bantuan Sosial	-	450.000.000,00
26	Pembayaran Tak Terduga	665.121.750,00	383.500.000,00
27	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	103.957.273.710,00	42.867.401.982,00
28	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	-	-
29	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	807.768.287,00	844.287.483,00
30	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	-	-
31	Jumlah Arus Keluar Kas (21 s.d 30)	916.772.573.931,00	793.966.786.716,00
32	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	457.330.544.563,76	339.980.129.481,85
33	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
34	ARUS MASUK KAS	-	-
35	Pencairan Dana Cadangan		
36	Penjualan atas Tanah	-	-
37	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		
38	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	-
39	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
40	Penjualan Aset Tetap Lainnya	-	-
41	Penjualan Aset Lainnya	-	-

42	Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-
43	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	-	-
44	Jumlah Arus Masuk Kas (35 s.d 43)	-	-
45	ARUS KELUAR KAS		
46	Pembentukan Dana cadangan		
47	Perolehan Tanah	1.448.770.000,00	6.993.328.488,00
48	Perolehan Peralatan dan Mesin	45.224.411.782,00	39.299.476.604,00
49	Perolehan Gedung dan Bangunan	69.220.926.880,00	119.256.011.812,00
50	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	305.796.283.790,00	157.823.831.433,00
51	Perolehan Aset Tetap Lainnya	749.859.000,00	2.320.650.500,00
52	Perolehan Aset Lainnya	-	-
53	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	25.049.973.219,00	5.000.000.000,00
54	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	-	-
55	Jumlah Arus Keluar Kas (46 s.d 54)	447.490.224.671,00	330.693.298.837,00
56	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	(447.490.224.671,00)	(330.693.298.837,00)
57	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
58	ARUS MASUK KAS		
59	Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat	-	-
60	Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Daerah lainnya	-	-
61	Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bank	-	-
62	Pinjaman Dalam Negeri- Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-
63	Pinjaman Dalam Negeri- Obligasi	-	-
64	Pinjaman Dalam Negeri- Lainnya	-	-
65	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-
66	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	-	-
67	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
68	Jumlah Arus Masuk Kas (59 s.d 67)	-	-
69	ARUS KELUAR KAS		
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-

74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi	-	-
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya	15.754.781.329,00	2.756.064.940,00
76	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-
77	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-
78	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
79	Jumlah Arus Keluar Kas (70s.d 78)	15.754.781.329,00	2.756.064.940,00
80	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	(15.754.781.329,00)	(2.756.064.940,00)
81	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
82	ARUS MASUK KAS		
83	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	102.324.095.763,00	87.790.164.645,01
84	Jumlah Arus Masuk Kas (83)	102.324.095.763,00	87.790.164.645,01
85	ARUS KELUAR KAS		
86	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	102.324.095.763,00	87.790.164.645,01
87	Jumlah Arus Keluar Kas (86)	102.324.095.763,00	87.790.164.645,01
88	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	-	-
89	Kenaikan /Penurunan Kas	(5.914.461.436,24)	2.436.853.948,85
90	Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	26.035.703.634,64	19.504.937.929,79
91	Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	20.121.242.198,40	21.941.791.878,64
92	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
93	Saldo Akhir Kas di Bendahara Kapitasi JKN	-	4.093.911.756,00
94	Saldo Kas Lainnya	169.507.385,00	739.373.918,00
95	Saldo Akhir Kas	20.290.749.583,40	26.775.077.552,64

Sumber: *Data Laporan Keuangan Kabupaten Maros*

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Agar informasi dalam laporan keuangan pemerintah dapat dipahami dan digunakan oleh pengguna dalam melakukan evaluasi dan menilai pertanggungjawaban keuangan negara, diperlukanlah Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). CaLK memberikan informasi kualitatif dan mengungkapkan kebijakan serta menjelaskan kinerja pemerintah dalam tahapan pengelolaan keuangan negara.

Selain itu, dalam CaLK memberikan penjelasan atas segala informasi yang ada dalam laporan keuangan lainnya dengan bahasa yang lebih mudah dicerna oleh lebih banyak pengguna laporan keuangan pemerintah. Sehingga masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam menyikapi kondisi keuangan negara yang dilaporkan secara pragmatis.

Pemahaman yang memadai terhadap komponen-komponen laporan keuangan pemerintah sangat diperlukan dalam menilaporan pertanggungjawaban keuangan negara.

CaLK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
2. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
3. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
5. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada laporan keuangan lainnya, seperti pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca;
6. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam laporan keuangan lainnya;
7. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lebar muka laporan keuangan.

D. Akuntansi Berbasis Akrua Di Pemerintah Kabupaten Maros

Pada tahun 2010, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Perubahan yang sangat nyata dari SAP sebelumnya yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 adalah diwajibkannya penggunaan akuntansi berbasis akrual (*accrual*) oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dari yang sebelumnya menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*).

Perubahan basis akuntansi ini tidak serta merta muncul karena sebenarnya sudah disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan sebelumnya yaitu pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Khusus untuk Pemerintah Daerah, pada tahun 2013 Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrua di Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan akuntansi berbasis akrual secara penuh paling lambat tahun anggaran 2015

Tidak terkecuali pada seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Maros selaku daerah otonom juga dituntut harus mengikuti aturan dalam bidang keuangan yang ditetapkan dan dimintai pertanggungjawaban oleh pemerintah pusat. Hal tersebut karena pada tahun 2015 terjadi perubahan basis akuntansi Pemerintah Daerah kabupaten Maros, dari yang sebelumnya menggunakan basis kas menuju akrual (*cash toward accrual basis*) menjadi sistem akuntansi berbasis akrual (*accrual basis*).

Suksesnya penerapan PP No. 71 Tahun 2010 di sektor publik tentu akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Khan dan Meyes (2009) menyampaikan bahwa untuk dapat berhasil dalam penerapan akuntansi berbasis akrual ada empat kondisi yang harus disiapkan yaitu kesiapan sistem akuntansi, kebijakan pemimpin, kemampuan teknis dan adanya sistem. Surepno (2015) juga melakukan penelitian mengenai kunci sukses dan peran strategis implementasi akuntansi berbasis akrual. Hasilnya menunjukkan keberhasilan implementasi akuntansi berbasis akrual Pemerintah Kota Semarang didukung oleh empat strategi utama yaitu komitmen pimpinan, pengembangan regulasi, pengembangan sistem informasi, dan pengembangan sumber daya manusia.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian terdahulu maka menurut hemat penulis dapat dikemukakan sebagai kesimpulan antara lain:

1. Pemerintah kabupaten Maros telah melaksanakan peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.
2. Pelaksanaan dari standar akuntansi pemerintah tersebut mewujudkan pemerintah Kabupaten Maros dalam rangka pelaksanaan tata pemerintahan yang baik meliputi transparansi, akuntabilitas dan partisipatif baik dari karyawan, Lembaga Legislatif, atau DPR maupun lembaga-lembaga sosial yang ada di kabupaten Maros melaksanakan sistem akuntansi yang telah dikemukakan.
3. Penerapan sistem akuntansi pemerintah dilihat dari laporan keuangan menggambarkan cukup baik dalam penyusunannya sehingga mudah untuk dipahami kepada setiap pemakai laporan keuangan tersebut.

B. Saran

Untuk melaksanakan peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 yang lebih baik dari segi proses penyusunan laporan keuangan maupun dalam penyajiannya, maka menurut hemat peneliti menyarankan sebagai berikut :

1. Sebaiknya pemerintah kabupaten Maros mensosialisasikan atau memberi pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan pemerintah kabupaten Maros. Adapun pihak-pihak

yang berkepentingan terhadap laporan keuangan adalah pemerintah kabupaten Maros, Dewan Perwakilan Rakyat, masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di kabupaten Maros.

2. Standar Akuntansi Pemerintah dengan sistem akrual maka perlu diinformasikan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan transaksi keuangan dengan sistem akrual secara menyeluruh.
3. Pemerintah harus lebih meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangannya sesuai dengan prinsi-prinsip akuntansi yang dapat diterima secara umum sebagaimana maksud dan tujuan dari standar akuntansi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- KSAP. 2006. *Memorandum Pembahasan Penerapan Basis Akrua Dalam Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia. Bahan Bahasan Untuk Limited Hearing*. Jakarta. (<http://ksap.org/memorandum>). Diakses 16 Desember 2016.
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- Haris, Syamsuddin, Mochtar Hidayat dan Syarif Salam. 2006. *Format Baru Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press
- Hasmi, Ali. 2010. *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Aceh Singkil Pada Era Otonomi Daerah*. Tesis. Medan. Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI
- Mardiasmo. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah panduan bagi eksekutif, DPR, dan Masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi, soasial dan politik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Nordiawan Deddi, Iswahyudi Sandi Putra, Maulidah Rahmawati. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba empat.
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*, BPF, Yogyakarta
- Peraturan Bupati Maros Nomor 37 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Maros*
- Peraturan Bupati Maros Nomor 38 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Maros*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang*

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.2005. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Sugiyono. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Tanjung, AbdulHafiz. 2014. Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pendekatan Teknis Sesuai dengan PP No. 71/2010. Bandung. Alfabeta.

www.medinamultimitra.com. Diakses 17 September 2016.

www.wikiapbn.com. Diakses tanggal 17 September 2016.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Dokumentasi Penelitian





Laporan Keuangan Kabupaten Maros Tahun 2015 dan 2015



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
METODE LANGSUNG

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	REFF CALK	2016	2015
1	2	3	4	5
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.1.5.1		
2	ARUS MASUK KAS			
3	Penerimaan Pajak Daerah		70.683.640.411,95	64.898.605.475,05
4	Penerimaan Retribusi Daerah		55.681.806.762,43	50.622.503.178,88
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan		10.314.224.366,00	6.267.571.943,98
6	Penerimaan Lain - lain PAD		28.344.197.087,78	19.699.005.007,54
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		23.149.679.642,00	17.341.562.150,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		4.400.802.227,00	1.840.245.234,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		704.125.168.000,00	645.209.768.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		335.455.226.668,00	95.401.330.000,00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian		6.568.247.000,00	149.285.757.000,00
12	Penerimaan Dana Desa		52.677.296.000,00	23.469.704.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		53.811.282.310,60	51.388.884.608,40
14	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		5.841.576.800,00	7.589.979.600,00
15	Penerimaan Hibah		23.049.973.219,00	932.000.000,00
16	Penerimaan Dana Darurat		0,00	0,00
17	Penerimaan Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
18	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00
19	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d 18)		1.374.103.118.494,76	1.133.946.916.197,85
20	ARUS KELUAR KAS			
21	Pembayaran Pegawai		588.796.479.859,00	527.259.136.234,00
22	Pembayaran Barang		208.790.027.125,00	165.115.313.144,00
23	Pembayaran Bunga		0,00	0,00
24	Pembayaran Hibah		13.755.903.200,00	57.047.147.873,00
25	Pembayaran Bantuan Sosial		0,00	450.000.000,00
26	Pembayaran Tak Terduga		665.121.750,00	383.500.000,00
27	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		103.957.273.710,00	42.867.401.982,00
28	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		0,00	0,00
29	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		807.768.287,00	844.287.483,00
30	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		0,00	0,00
31	Jumlah Arus Keluar Kas (21 s.d 30)		916.772.573.931,00	793.966.786.716,00
32	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI		457.330.544.563,76	339.980.129.481,85
33	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.1.5.2		
34	ARUS MASUK KAS			
35	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
36	Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
37	Penjualan atas Peralatan & Mesin		0,00	0,00
38	Penjualan atas Gedung & Bangunan		0,00	0,00
39	Penjualan Atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan		0,00	0,00
40	Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
41	Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
42	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
43	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
44	Jumlah Arus Masuk Kas (35 s.d 43)		-	0,00
45	ARUS KELUAR KAS			
46	Pembentukan Dana Cadangan			0
47	Perolehan Tanah		1.448.770.000,00	6.993.328.488,00
48	Perolehan Peralatan & Mesin		45.224.411.782,00	39.299.476.604,00
49	Perolehan Gedung & Bangunan		69.220.926.880,00	119.256.011.812,00
50	Perolehan Jalan, Irigasi & Jaringan		305.796.283.790,00	157.823.831.433,00
51	Perolehan Aset Tetap Lainnya		749.859.000,00	2.320.650.500,00
52	Perolehan Aset Lainnya		0,00	0,00
53	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		25.049.973.219,00	5.000.000.000,00
54	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
55	Jumlah Arus Keluar Kas (46 s.d 54)		447.490.224.671	330.693.298.837,00
56	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI		-447.490.224.671	-330.693.298.837,00



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
NERACA
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REFF CALK	31 DESEMBER 2016	31 DESEMBER 2015
1	2	3	4	5
1	ASET	5.1.4.1		
2	ASET LANCAR			
3	Kas di Kas Daerah		14,122,121,000.40	21,938,591,378.64
4	Kas di Bendahara Pengeluaran		0.00	3,200,500.00
5	Kas di Bendahara Penerimaan		0.00	-
6	Kas di Bendahara Kapitasi JKN		5,999,121,198.00	4,093,911,756.00
7	Kas Lainnya		169,507,385.00	739,373,918.00
8	Investasi Jangka Pendek		0.00	-
9	Piutang Pajak		29,703,503,964.69	20,618,905,868.85
10	Piutang Retribusi		8,761,473,757.24	5,190,197,903.24
11	Piutang Bagi Hasil Provinsi		12,928,046,801.00	-
12	Beban Dibayar Dimuka		0.00	-
13	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		10,219,616.00	3,773,568.00
14	Piutang Lainnya		803,686,000.00	12,649,607,690.00
15	Penyisihan Piutang		(6,641,753,393.28)	(4,590,055,597.60)
16	Persediaan		8,345,348,467.25	7,886,146,116.82
17	Jumlah Aset Lancar (3 s.d 16)		74,201,274,796.30	68,533,653,101.95
18	INVESTASI JANGKA PANJANG			
19	Investasi Non Permanen			
20	Pinjaman Jangka Panjang		0.00	0.00
21	Investasi dalam surat utang Negara		0.00	0.00
22	Investasi dalam Proyek Pembangunan		0.00	0.00
23	Investasi Non Permanen Lainnya		0.00	0.00
24	Jumlah Investasi Non Permanen (20 s.d 23)		0.00	0.00
25	Investasi Permanen			
26	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		49,035,044,896.59	26,108,078,273.07
27	Investasi Permanen Lainnya		0.00	0.00
28	Jumlah Investasi Permanen (26 s.d 27)		49,035,044,896.59	26,108,078,273.07
29	Jumlah Investasi Jangka Panjang (24+28)		49,035,044,896.59	26,108,078,273.07
30	ASET TETAP			
31	Tanah		547,852,590,901.96	544,120,759,949.27
32	Peralatan dan Mesin		307,459,703,082.34	252,542,435,008.34
33	Gedung dan Bangunan		755,151,176,221.80	694,922,022,843.68
34	Jalan, Irigasi dan Jaringan		1,323,430,513,251.11	1,021,928,912,685.92
35	Aset Tetap Lainnya		14,156,382,948.50	8,709,024,335.49
36	Konstruksi dalam Pengerjaan		70,843,257,603.98	60,340,688,699.48
37	Akumulasi Penyusutan		(993,687,473,224.45)	(891,353,160,501.08)
38	Jumlah Aset Tetap (31 s.d 37)		2,025,206,150,785.24	1,691,210,683,021.10
39	DANA CADANGAN			
40	Dana Cadangan		0.00	0.00
41	Jumlah Dana Cadangan (40)		0.00	0.00
42	ASET LAINNYA			
43	Tagihan Penjualan Angsuran		0.00	0.00
44	Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran		0.00	0.00
45	Tagihan Penjualan Angsuran Netto		0.00	0.00
46	Tuntutan Ganti Rugi		5,778,514,816.68	6,289,368,664.68
47	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi		(4,619,741,751.33)	(3,617,549,112.76)
48	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0.00	0.00
49	Aset Tak Berwujud		1,483,008,048.00	1,483,008,048.00
50	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud		(1,104,766,399.00)	0.00
51	Aset Lain-Lain		12,073,932,689.22	11,787,018,308.33
52	Jumlah Aset Lainnya (43 s.d 51)		13,610,947,403.57	15,941,845,908.25
53	JUMLAH ASET (17+29+38+41+52)		2,162,053,417,881.70	1,801,794,260,304.37

NO	URAIAN	REF CALC	31 DESEMBER 2016	31 DESEMBER 2015
1	2	3	4.00	5
54	KEWAJIBAN	5.1.4.2		
55	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
56	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		-	0.00
57	Utang Kepada BPJS Kesehatan		13,692,967,369.00	13,692,967,369.00
58	Utang Kepada PT Taspen			795,364,527.00
59	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		-	0.00
60	Pendapatan Diterima Dimuka		499,680,465.25	217,272,136.50
61	Utang Beban		1,176,136,783.00	906,917,799.00
62	Utang Jangka Pendek lainnya		14,183,384,892.44	25,732,666,390.04
63	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (Jumlah 56 s.d 62)		29,552,169,509.69	41,345,188,221.54
64	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
65	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan		-	0.00
66	Utang Dalam Negeri - Obligasi		-	0.00
67	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	0.00
68	Utang Pemerintah Daerah Lainnya		-	0.00
69	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (Jumlah 65 s.d 68)		-	0.00
70	JUMLAH KEWAJIBAN (63 + 68)		29,552,169,509.69	41,345,188,221.54
71	EKUITAS	5.1.4.3		
72	Ekuitas		2,132,501,248,372.01	1,760,449,072,082.83
73	JUMLAH EKUITAS (72)		2,132,501,248,372.01	1,760,449,072,082.83
74	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (Jumlah 70 + 73)		2,162,053,417,881.70	1,801,794,260,304.37

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

BUPATI MAROS,

Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM.



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REFF CALK	2016	2015
1	2	3		4
1	Ekuitas Awal	5.1.3.1	1,760,449,072,082.83	1,159,235,564,274.16
2	Surplus - LO	5.1.3.2	374,012,814,787.67	248,087,809,019.78
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :	5.1.3.3		
	Koreksi Nilai Persediaan			-
	Selisih Revaluasi Aset Tetap			-
	Koreksi Ekuitas Lainnya			353,125,678,788.75
	Koreksi Pencatatan Aset Tetap tahun sebelumnya			350,254,666,038.64
	Koreksi saldo awal piutang menara telekomunikasi (piutang 2014 belum dicatat)			(838,543,454.24)
	Koreksi tambah aset tetap untuk gedung dan bangunan dari koreksi data utang 2015			1,722,186,700.00
	Koreksi tambah aset tetap untuk belanja hibah pada tahun anggaran 2014 (kesalahan penganggaran TA.2014)			299,560,050.00
	Koreksi tambah aset tetap untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan dari koreksi data utang 2015			6,799,370,000.00
	Koreksi tambah KDP dikarenakan belum dicatat			673,871,000.00
	Koreksi tambah atas utang jangka pendek			(1,797,951,084.00)
	Koreksi kurang atas utang jangka pendek			(3,358,950.00)
	Koreksi kurang persediaan alkes			1,870,991.20
	Koreksi Penyertaan Modal PDAM			1,108,078,272.07
	Koreksi kurang persediaan obat-obatan saldo awal Tahun 2015			(5,042,464,206.66)
	Koreksi kurang persediaan Alat Kesehatan saldo awal Tahun 2015			(1,645,402.00)
	Koreksi tambah persediaan obat-obatan			1,479,991.60
	Koreksi saldo awal beban penyusutan 2015			(191,993,597.86)
	Koreksi saldo awal Kas Lainnya-Dana BOS		(337,106,829.00)	
	Koreksi Penyisihan Piutang		120,902,669.17	
	Koreksi Saldo awal Gedung dan Bangunan Sekda		(20,000.50)	
	Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		373,469,261.99	
	Koreksi tambah atas Investasi (Penyertaan Modal di PDAM)		(2,123,006,595.48)	
	Koreksi Utang Jangka Pendek Lainnya		(0.20)	
	Koreksi Aset Tetap Belum Tercatat		5,123,000.00	
	Koreksi Ekuitas Lainnya-Pembulatan		(4.47)	
4	Ekuitas Akhir	5.1.3.4	2,132,501,248,372.01	1,760,449,052,082.69

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

BUPATI MAROS

Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM.



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REFF CALK	2016	2015
1	2	3		4
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.1.6.1	26,035,703,634.64	19,504,937,929.79
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.1.6.2	26,035,703,634.64	(19,504,937,929.79)
3	Subtotal (1-2)		0.00	0.00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SilPA/SikPA)	5.1.6.3	20,121,242,198.40	26,035,703,634.64
5	Subtotal (3+4)		20,121,242,198.40	26,035,703,634.64
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0.00	0.00
7	Lain-Lain		0.00	0.00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	5.1.6.4	20,121,242,198.40	26,035,703,634.64

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

BUPATI MAROS,

Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM.



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REFF CALC	2016	2015	Kenalkan/ Penurunan	%
1	2	3				4
	KEGIATAN OPERASIONAL					
1	PENDAPATAN - LO	5.1.2.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
3	Pendapatan Pajak Daerah		79.684,720,294.88	69,471,060,975.88	10,193,659,319.00	14.67
4	Pendapatan Retribusi Daerah		69,074,192,500.69	62,629,406,891.79	6,444,785,608.80	12.25
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		10,314,224,366.00	6,267,571,943.68	4,046,652,422.02	64.66
6	Lain-lain PAD yang Sah		27,788,182,787.78	18,876,889,003.67	8,911,293,784.21	47.21
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)		176,841,319,949.25	147,244,928,815.22	29,596,391,134.03	138.69
8	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN					
9	Dana Bagi Hasil Pajak		23,149,679,642.00	17,341,562,150.00	5,808,117,492.00	33.49
10	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		4,400,802,227.00	1,840,245,234.00	2,560,556,993.00	139.14
11	Dana Alokasi Umum		704,125,166,000.00	645,209,768,000.00	58,915,398,000.00	9.13
12	Dana Alokasi Khusus		336,455,226,668.00	95,401,330,000.00	240,053,896,668.00	251.63
13	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (9 s.d. 12)		1,067,130,874,537.00	759,792,905,384.00	307,337,969,153.00	433.39
14	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA					
15	Dana Otonomi Khusus		0.00	0.00	0.00	0.00
16	Dana Penyesuaian		6,588,247,900.00	149,285,757,000.00	(142,717,510,000.00)	(95.60)
17	Dana Desa		52,677,296,000.00	23,469,704,000.00	29,207,592,000.00	124.45
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya (15 s.d. 17)		59,245,543,000.00	172,755,461,000.00	(113,509,918,000.00)	(65.71)
19	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI					
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		55,408,723,421.60	62,719,490,298.40	(7,310,766,876.80)	(11.66)
21	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		5,841,576,800.00	7,589,979,600.00	(1,748,402,800.00)	(23.04)
22	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (20 s.d. 21)		61,250,300,221.60	70,309,469,898.40	(9,059,169,676.80)	(12.88)
23	Total Pendapatan Transfer (13+18+22)		1,187,626,717,758.60	1,002,857,836,282.40	184,768,881,476.20	18.42
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
25	Pendapatan Hibah		83,145,320,041.00	53,195,075,394.00	29,950,244,647.00	56.30
26	Pendapatan Dana Darurat		0.00	0.00	0.00	0.00
27	Pendapatan Lainnya		0.00	50,041,189.26	(50,041,189.26)	(100.00)
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah (25 s.d. 27)		83,145,320,041.00	53,285,116,583.26	29,860,203,457.74	58.04
29	JUMLAH PENDAPATAN (7+23+28)		1,447,813,357,748.85	1,203,387,881,680.88	244,225,476,067.97	20.29
30	BEBAN - LO	5.1.2.2				
31	BEBAN OPERASI					
32	Beban Pegawai		595,889,510,614.00	639,378,504,473.00	62,511,006,141.00	11.72
33	Beban Barang dan Jasa		241,860,088,421.75	201,473,922,002.40	40,386,166,419.35	20.05
34	Beban Bunga		0.00	0.00	0.00	0.00
35	Beban Subsidi		0.00	0.00	0.00	0.00
36	Beban Hibah		16,604,898,900.00	62,864,759,373.00	(47,260,060,473.00)	(75.18)
37	Beban Bantuan Sosial		0.00	450,000,000.00	(450,000,000.00)	(100.00)
38	Beban Penyusutan dan Amortisasi		103,812,548,384.36	72,959,811,290.41	30,852,737,093.95	42.29
39	Beban Penyisihan Piutang		3,638,502,603.42	8,207,604,710.36	(4,569,102,108.94)	(55.67)
40	Beban Lain-lain		8,382,504,878.45	11,302,603,644.22	(10,494,835,357.22)	(92.85)
41	Jumlah Beban OPERASI (32 s.d. 40)		969,187,853,801.98	890,637,205,493.39	70,975,911,717.14	7.97
42	TRANSFER					
43	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak		0.00	42,867,401,982.00	(42,867,401,982.00)	(100.00)
44	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0.00	0.00	0.00	0.00
45	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		0.00	0.00	0.00	0.00
46	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		103,957,273,710.00	0.00	103,957,273,710.00	-
47	Beban Transfer Keuangan Lainnya		807,768,287.00	844,287,483.00	(36,519,196.00)	(4.33)
48	Jumlah Beban Transfer (43 s.d. 47)		104,765,041,997.00	43,711,689,465.00	61,053,352,532.00	139.67
49	JUMLAH BEBAN (41+48)		1,073,952,895,798.98	934,348,894,958.39	132,029,264,249.14	14.13
50	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (30-51)		373,660,461,949.87	269,038,986,722.49	112,196,211,918.83	41.70
51	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
52	Surplus Penjualan Aset Nonlancar		0.00	0.00	0.00	0.00
53	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0.00	0.00	0.00	0.00
54	Surplus dari Kegiatan Non Operasional lainnya		2,282,342,370.80	0.00	2,282,342,370.80	0.00
55	Jumlah Surplus Non Operasional (54 s.d. 56)		2,282,342,370.80	0.00	2,282,342,370.80	0.00
56	DEFISIT NON OPERASIONAL					
57	Defisit Penjualan Aset Lancar		0.00	0.00	0.00	0.00
58	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0.00	0.00	0.00	0.00
59	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0.00	20,567,677,702.71	(20,567,677,702.71)	(100.00)
60	Jumlah Defisit Non Operasional (57 - 62)		0.00	20,567,677,702.71	(20,567,677,702.71)	(100.00)
61	Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional (57 - 62)		2,282,342,370.80	(20,567,677,702.71)	22,850,020,073.51	(111.10)
62	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa (52+63)		375,942,804,320.67	248,471,309,019.78	135,046,231,892.34	54.35
63	POS LUAR BIASA					
64	Pendapatan Pos Luar Biasa		0.00	0.00	0.00	0.00
65	Beban Luar Biasa		685,121,750.00	383,500,000.00	281,621,750.00	73.43
66	Pos Luar Biasa (65+66)		(685,121,750.00)	(383,500,000.00)	(281,621,750.00)	73.43
67	SURPLUS/DEFISIT (63+67)	5.1.2.3	375,277,682,570.67	248,087,809,019.78	134,764,610,142.34	54.32

248,087,809,019.78

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

BUPATI MAROS,

Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2016		%	REALISASI TAHUN 2015
			ANGGARAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN	5.1.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
3	PENDAPATAN PAJAK DAERAH		78,561,000,000.00	70,683,640,411.95	89.98	64,898,605,475.05
4	PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH		64,503,500,000.00	55,681,806,762.43	86.32	50,622,503,178.88
5	PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN		10,314,224,400.00	10,314,224,366.00	100.00	6,267,571,943.98
6	LAIN - LAIN P A D YANG SAH		22,750,000,000.00	28,344,197,087.78	124.59	19,699,005,007.54
7	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (3 s.d 6)		176,118,724,400.00	165,023,868,628.16	93.70	141,487,685,605.45
8	PENDAPATAN TRANSFER					
9	TRANSFER PEM. PUSAT - DANA PERIMBANGAN					
10	BAGI HASIL PAJAK		22,387,967,000.00	23,149,679,642.00	103.40	17,341,562,150.00
11	BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM		5,101,573,000.00	4,400,802,227.00	86.26	1,840,245,234.00
12	DANA ALOKASI UMUM		704,125,166,000.00	704,125,166,000.00	100.00	645,209,768,000.00
13	DANA ALOKASI KHUSUS		412,020,694,000.00	335,455,226,668.00	81.42	95,401,330,000.00
14	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER-DANA PERIMBANGAN (10 s.d 14)		1,143,635,400,000.00	1,067,130,874,537.00	93.31	759,792,905,384.00
15	TRANSFER PEM. PUSAT LAINNYA					
16	DANA OTONOMI KHUSUS		0.00	0.00	0.00	0.00
17	DANA PENYESUAIAN		6,409,727,000.00	6,568,247,000.00	102.47	149,285,757,000.00
18	DANA DESA		52,677,296,000.00	52,677,296,000.00	100.00	23,469,704,000.00
19	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA (17 s.d 18)		59,087,023,000.00	59,245,543,000.00	100.27	172,755,461,000.00
20	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI					
21	BAGI HASIL PAJAK		66,307,705,041.00	53,811,282,310.60	81.15	51,388,884,608.40
22	BAGI HASIL LAINNYA		13,587,404,802.00	5,841,576,800.00	42.99	7,589,979,600.00
23	JUMLAH TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI (21 s.d 22)		79,895,109,843.00	59,652,859,110.60	74.66	58,978,864,208.40
24	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER (15+19+23)		1,282,617,532,843.00	1,186,029,276,647.60	92.47	991,527,230,592.40
25	LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
26	PENDAPATAN HIBAH		23,049,973,217.00	23,049,973,219.00	100.00	932,000,000.00
27	PENDAPATAN DANA DARURAT		0.00	0.00	0.00	0.00
29	PENDAPATAN LAINNYA		0.00	0.00	0.00	0.00
30	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH (26 s.d 29)		23,049,973,217.00	23,049,973,219.00	100.00	932,000,000.00
31	JUMLAH PENDAPATAN DAN TRANSFER (7+24+30)		1,481,786,230,460.00	1,374,103,118,494.76	92.73	1,133,946,916,197.85
32	BELANJA	5.1.1.2				
33	BELANJA OPERASI					
34	BELANJA PEGAWAI		596,572,587,828.00	588,796,479,869.00	98.70	527,269,136,234.00
35	BELANJA BARANG		254,479,240,854.00	208,790,027,125.00	82.05	165,115,313,144.00
36	BELANJA BUNGA		0.00	0.00	0.00	0.00
37	BELANJA SUBSIDI		0.00	0.00	0.00	0.00
38	BELANJA HIBAH		16,502,258,800.00	13,755,903,200.00	83.36	57,047,147,873.00
39	BELANJA BANTUAN SOSIAL		300,000,000.00	0.00	0.00	450,000,000.00
40	JUMLAH BELANJA OPERASI (34 s.d 39)		867,854,087,482.00	811,342,410,184.00	93.49	749,871,597,251.00

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	REFF CALC	TAHUN 2016		%	REALISASI TAHUN 2015
			ANGGARAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7
41	BELANJA MODAL					
42	BELANJA TANAH		5,518,809,275.00	1,448,770,000.00	26.25	6,993,328,488.00
43	BELANJA PERALATAN DAN MESIN		50,800,888,517.00	45,224,411,782.00	89.02	39,299,478,604.00
44	BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN		80,395,869,817.00	69,220,926,880.00	86.10	119,256,011,812.00
45	BELANJA JALAN, IRIGASI & JARINGAN		324,693,123,705.00	305,796,283,790.00	94.18	157,823,831,433.00
46	BELANJA ASET TETAP LAINNYA		749,859,000.00	749,859,000.00	100.00	2,320,650,500.00
47	BELANJA ASET LAINNYA		0.00	0.00	0.00	0.00
48	JUMLAH BELANJA MODAL (42 s.d 46)		462,158,580,314.00	422,440,251,452.00	91.41	325,693,298,837.00
49	BELANJA TIDAK TERDUGA					
50	BELANJA TAK TERDUGA		1,000,000,000.00	665,121,750.00	66.51	383,500,000.00
51	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA (49)		1,000,000,000.00	665,121,750.00	66.51	383,500,000.00
52	JUMLAH BELANJA (40+47+50)		1,331,012,667,796.00	1,234,447,783,386.00	92.75	1,075,948,396,088.00
53	T R A N S F E R	5.1.1.3				
54	TRANSFER BAGI HASIL KE DESA					
55	BAGI HASIL PAJAK		0.00	0.00	0.00	42,667,401,982.00
56	BAGI HASIL RETRIBUSI		0.00	0.00	0.00	0.00
57	BAGI HASIL PENDAPATAN LAINNYA		0.00	0.00	0.00	844,287,483.00
58	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN					
59	BANTUAN KEUANGAN DESA		125,648,509,700.00	103,957,273,710.00	82.74	0.00
60	BANTUAN KEUANGAN LAINNYA		988,157,300.00	807,768,267.00	81.74	0.00
61	JUMLAH TRANSFER (54 s.d. 59)		126,636,667,000.00	104,765,041,977.00	82.73	43,711,689,465.00
62	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (51+60)		1,457,649,334,796.00	1,339,212,825,383.00	91.87	1,119,660,085,553.00
63	SURPLUS / (DEFISIT) (31 - 61)	5.1.1.4	24,136,895,664.00	34,890,293,111.76	144.55	14,286,830,644.85
64	PEMBIAYAAN	5.1.1.5				
65	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
66	PENGUNAAN SILPA		26,775,077,553.00	26,035,703,634.64	97.24	19,504,937,929.79
67	HASIL PENJUALAN ASET DAERAH YANG DIPISAHKAN		0.00	0.00	0.00	0.00
68	PINJAMAN DALAM NEGERI		0.00	0.00	0.00	-0.00
69	PENERIMAAN KEMBALI PINJAMAN DAERAH		0.00	0.00	0.00	0.00
70	PENERIMAAN KEMBALI PIUTANG DAERAH		0.00	0.00	0.00	0.00
71	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (66 s.d 70)		26,775,077,553.00	26,035,703,634.64	97.24	19,504,937,929.79
72	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
73	PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH		25,050,973,217.00	25,049,973,219.00	100.00	5,000,000,000.00
74	PEMBAYARAN POKOK PINJAMAN DALAM NEGERI		0.00	0.00	0.00	0.00
75	PEMBAYARAN POKOK PINJAMAN DALAM NEGERI-LAINNYA		25,861,000,000.00	15,754,781,329.00	60.92	2,756,064,940.00
76	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (73 s.d. 75)		50,911,973,217.00	40,804,754,548.00	80.15	7,756,064,940.00
77	PEMBIAYAAN NETTO (71 - 76)		(24,136,895,664.00)	(14,769,050,913.36)	61.19	11,748,872,989.79
78	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (62 + 77)		0.00	20,121,242,198.40	0.00	26,035,703,634.64

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

BUPATI MAROS,

Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM.

RIWAYAT HIDUP



SALAHUDIN, Dilahirkan di Kabupaten Bima tepatnya di Desa Campa Kecamatan Madapangga pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 1994. Anak keiga dari enam bersaudara pasangan dari Nurdin Ismail dengan Sa'adiyah

Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SDN Inpres Campa di Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima pada tahun 2006. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 2 Madapangga Kecamatan Madapangga dan tamat pada tahun 2009 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Madapangga pada tahun 2009 dan seslesai pada tahun 2012. Pada tahun 2012 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi swasta, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar (Uismuh) Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Program Studi Pendidikan Akuntansi. Peneliti menyelesaikan kuliah strata satu (S1) pada tahun 2018.